BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI SULAWESI SELATAN

Katalog : 9201002.73

Analisis ICOR Satuan Wilayah Pembangunan

PROVINSI SULAWESI SELATAN

Tahun 2014-2018

https://sulsel.bps.go.id

Wilayah Mamminasata

Maros, Makassar, Gowa, Takalar

Analisis ICOR

Satuan Wilayah Pembangunan

PROVINSI SULAWESI SELATAN

Tahun 2014-2018

https://sulsel.bps.go.id

Wilayah Mamminasata

Maros, Makassar, Gowa, Takalar

Analisis ICOR
Satuan Wilayah Pembangunan
Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2014-2018: Wilayah Mamminasata

https://sulsel.bps.go.id

ISSN : 978-623-7581-32-1
No. Publikasi : 73550.2018
Katalog : 9201002.73

Ukuran Buku : 17,6 x 25 cm
Jumlah Halaman : vii + 66 halaman

Naskah:
Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik BPS Provinsi Sulawesi Selatan

Penyunting:
Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik BPS Provinsi Sulawesi Selatan

Desain Kover oleh:
Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik BPS Provinsi Sulawesi Selatan

Penerbit:
Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan

Pencetak:
Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan

Sumber Ilustrasi: -

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengkomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

TIM PENYUSUN

Penanggungjawab Umum
Yos Rusdiansyah

Penanggungjawab Teknis
Didik Nursetyohadi

Penyunting
Wuri Wahyuni
Joko Siswanto

Penulis
Srirezeky Hanawiya Pratiwi

Desain Cover dan Layout
Muhammad Ilham Mubarok

https://sulsel.bps.go.id

Halaman ini Sengaja Dikosongkan

https://sulsel.bps.go.id

Kata Pengantar

Investasi merupakan bagian penting yang sangat diperlukan dalam proses pembangunan suatu wilayah. Besar kecilnya investasi akan berpengaruh pada perekonomian wilayah tersebut. Sehingga ketersediaan data investasi dan analisis yang terkait dengan investasi sangat diperlukan pemerintah daerah guna mengetahui efisiensi dari investasi yang telah dilakukan (baik oleh pemerintah maupun swasta) serta dalam rangka menentukan kebutuhan investasi yang dibutuhkan untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.

Publikasi Analisis ICOR Satuan Wilayah Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014-2018 merupakan publikasi baru yang diterbitkan oleh BPS Provinsi Sulawesi Selatan. Publikasi ini memberikan gambaran besarnya ICOR dan tingkat efisiensi dari suatu investasi yang terbentuk disetiap kab/kota dan wilayah-wilayah pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan. Selain itu, publikasi ini juga menyajikan dan menganalisis ketimpangan investasi yang terjadi di setiap wilayah pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan.

Semoga publikasi ini bisa memberikan informasi berharga bagi para pengguna data BPS, baik pemerintah maupun publik, dan diharapkan publikasi ini bisa menjadi sumber informasi yang berguna untuk berbagai tujuan

Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah bekerja keras dan membantu dalam penyusunan publikasi ini. Kritik dan saran akan sangat berharga untuk penyempurnaan publikasi selanjutnya.

Makassar, Juni 2020

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK

PROVINSI SULAWESI SELATAN

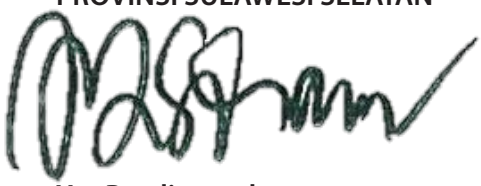

Yos Rusdiansyah

https://sulsel.bps.go.id

Halaman ini Sengaja Dikosongkan

https://sulsel.bps.go.id

Daftar Isi

v	**Kata Pengantar (i)**	
vii	**Daftar Isi (iii)**	
1	**BAB I**	**Pendahuluan**
7	**BAB II**	**Konsep dan Metodologi**
9	2.1.	Pengertian investasi dan PMTB
13	2.2.	Pengertian ICOR
14	2.3.	Metodologi penghitungan ICOR
23	**BAB III**	**Perkembangan Perekonomian Wilayah Mamminasata**
25	3.1.	Tinjauan dari Sisi PDRB Lapangan Usaha
30	3.2.	Tinjauan dari Sisi PDRB Pengeluaran
33	**BAB IV**	**Perkembangan Investasi, ICOR, dan Ketimpangan Investasi Wilayah Mamminasata**
35	4.1.	Perkembangan Investasi
38	4.2.	ICOR 2014-2018
43	4.3.	Ketimpangan Investasi Wilayah
45	**BAB V**	**Kesimpulan**
49	**Lampiran Tabel**	

https://sulsel.bps.go.id

Halaman ini Sengaja Dikosongkan

https://sulsel.bps.go.id

BAB I
PENDAHULUAN

https://sulsel.bps.go.id

Halaman ini Sengaja Dikosongkan

https://sulsel.bps.go.id

BAB I
PENDAHULUAN

Secara tradisional, pembangunan memiliki arti peningkatan yang terus menerus pada Gross Domestic Product atau Produk Domestik Bruto untuk skala negara atau peningkatan yang terus menerus pada Produk Domestik Regional Bruto untuk skala provinsi, kabupaten, atau kota. Dalam konteks daerah, pembangunan suatu daerah merupakan suatu proses dimana pemerintah dan masyarakatnya mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antar pemerintah daerah dan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut (Arsyad, 1999; Blakely, 1989). Tolak ukur keberhasilan pembangunan dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi, dan semakin kecilnya ketimpangan pendapatan antarpenduduk, antar daerah dan antarsektor.

Meskipun pada akhir dasawarsa 1960-an banyak negara berkembang mulai menyadari bahwa pertumbuhan ekonomi tidak identik dengan pembangunan ekonomi, dan berkeyakinan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan syarat yang diperlukan (*necessary*) tetapi tidak mencukupi (*sufficient*) bagi proses perbangunan (Esmara, 1986: 12; Meier, 1989: 7), namun pada praktiknya di banyak negara setidaknya pada tahap awal pembangunan umumnya berfokus pada peningkatan produksi. Meskipun banyak varian pemikiran, pada dasarnya kata kunci dalam pembangunan adalah pembentukan modal. Oleh karena itu, strategi pembangunan yang dianggap paling sesuai adalah akselerasi pertumbuhan ekonomi dengan mengundang modal dari luar dan melakukan industrialisasi.

Menurut pandangan para ekonom klasik (Adam Smith, David Ricardo, Thomas Robert Malthus, dan John Stuart Mill) maupun ekonom neoklasik (Robert Solow dan Trevor Swan) ada empat faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yaitu (1) jumlah penduduk, (2) jumlah stok barang modal, (3) luas tanah dan kekayaan alam, dan (4) tingkat teknologi yang digunakan (Sukirno, 1985). Artinya, tingkat pertumbuhan ekonomi dan investasi merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dan saling membutuhkan. Semakin besar investasi maka semakin besar tingkat pertumbuhan yang dicapai. Sebaliknya semakin tinggi pertumbuhan ekonomi semakin besar pendapatan yang dapat ditabung dan investasi akan meningkat (Todaro, 2003).

Determinan penting yang berpengaruh terhadap pembentunkan output perekonomian di suatu wilayah adalah stok kapital. Dalam model pertumbuhan Harrod-Domar dinyatakan bahwa output merupakan fungsi dari stok kapital dan tenaga kerja pada tingkat teknologi tertentu (Hess and Ross, 1997). Investasi akan meningkatkan

https://sulsel.bps.go.id

stok kapital, sedangkan depresiasi/penyusutan akan mengurangi stok kapital (Mankiw, 2007). Kenaikan stok kapital akan meningkatkan kapasitas suatu wilayah dalam proses penciptaan output perekonomian. Dengan demikian, investasi diperlukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Investasi mengacu pada pengeluaran untuk perluasan usaha dan peralatan baru, dan hal ini menyebabkan persediaan modal bertambah (Mankiw, 2007:186). Pertambahan investasi kemudian akan berdampak pada kenaikan pertumbuhan ekonomi, Pertumbuhan ekonomi dapat berkembang dengan adanya pertambahan faktor-faktor produksi, terutama penambahan peralatan produksi dan perbaikan faktor-faktor produksi tersebut. Pengerahan atau mobilisasi dana tabungan guna menciptakan bekal investasi dalam jumlah yang memadai dibutuhkan untuk mempercepat laju pertumbuhan ekonomi (Todaro, 2003:113).

Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi suatu daerah, sumber-sumber pembiayaan bisa berasal dari ekspor, bantuan luar negeri, investasi asing dan tabungan domestik (Kuncoro, 1997:215). Adapun alokasi modal yang kita kenal sebagai investasi, utamanya berasal dari dua sumber yakni baik PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) maupun PMA (Penanaman Modal Asing). Investasi yang berasal dari dalam negeri/ domestik maupun luar negeri/nondomestik akan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Peningkatan investasi tidak hanya menaikan permintaan agregat, tetapi juga menaikan penawaran agregat melalu pengaruhnya terhadap kapasitas produksi. Dalam perspektif waktu yang lebih panjang, investasi meningkatkan stok kapital dan setiap penambahan stok kapital akan meningkatkan kemampuan masyarakat untuk menghasilkan output yang pada gilirannya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

https://sulsel.bps.go.id

Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kegiatan perencanaan pembangunan yang terkait dengan investasi adalah *Incremental Capital Output Ratio* (ICOR). Nilai ICOR menunjukkan jumlah investasi baru yang dibutuhkan untuk menaikkan/menambah satu unit output dalam perekonomian suatu wilayah. Besaran ICOR diperoleh dari perbandingan tambahan kapital dengan tambahan output. ICOR tersebut digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dari suatu investasi. Jika koefisien ICOR bernilai negatif atau nilai relatif besar dapat menunjukkan bahwa terjadi *inefficiency* dalam investasi. Kondisi investasi yang efisien akan terjadi pada koefisien ICOR yang nilainya relatif kecil. Namun demikian, untuk menilai tingkat efisiensi suatu investasi juga mempertimbangkan karakteristik perekonomian suatu wilayah apakah bersifat *capital intensive* atau *labor intensive*.

Semakin tinggi nilai ICOR memberikan indikasi kemungkinan terjadinya inefisiensi dalam penggunaan investasi. ICOR yang rendah menunjukkan adanya efisiensi dalam penggunaan modal. Efisiensi terjadi akibat adanya perbaikan teknologi, sehingga

semakin rendah ICOR maka penggunaan modal semakin efisien dan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Arsyad, 1988). Widodo (1990) menyatakan bahwa, produktivitas investasi dapat dikatakan baik apabila nilai ICOR berada pada kisaran 3 - 4.

Investasi merupakan salah satu pilar pertumbuhan ekonomi. Informasi mengenai potensi investasi dan iklim investasi daerah sangat diperlukan investor sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan untuk investasi. Untuk melihat keterkaitan antara investasi dan pertumbuhan ekonomi dapat menggunakan indikator ICOR. Nilai ICOR dapat merefleksikan besarnya produktivitas kapital yang akan berpengaruh terhadap pencapaian pertumbuhan ekonomi. Kajian mengenai ICOR menjadi sangat penting dan menarik untuk mendorong peningkatan investasi dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Kajian tersebut diharapkan dapat mengetahui penyebab tingginya angka ICOR, sehingga dapat dirumuskan rekomendasi bahan kebijakan yang tepat dalam rangka mendorong investasi yang akhirnya menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan merata.

https://sulsel.bps.go.id

Halaman ini Sengaja Dikosongkan

https://sulsel.bps.go.id

BAB II

KONSEP DAN METODE PERHITUNGAN

https://sulsel.bps.go.id

Halaman ini Sengaja Dikosongkan

https://sulsel.bps.go.id

BAB II
KONSEP DAN METODE PERHITUNGAN

2.1. Pengertian Investasi

Investasi sangat diperlukan dalam pembangunan ekonomi suatu wilayah. Untuk menghasilkan output, selain membutuhkan bahan baku dan tenaga kerja juga diperlukan barang modal yang digunakan dalam proses produksi. Dengan investasi diharapkan dapat menambah stok kapital dan pada gilirannya akan meningkatkan kapasitas produksi. Dengan demikian, output dan pendapatan masyarakat akan meningkat. Dalam jangka panjang akumulasi investasi dapat mendorong perkembangan berbagai aktivitas ekonomi sehingga meningkatkan pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah/negara.

Pemahaman kondisi tersebut memberikan pengertian pentingnya informasi investasi. Berdasarkan *System of National Accounts* (SNA), besarnya investasi yang direalisasikan di suatu wilayah/negara pada suatu tahun tertentu adalah sama dengan jumlah Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) ditambah perubahan inventori/stok. SNA adalah buku panduan yang diterbitkan oleh *United Nations* (PBB) mengenai penyusunan neraca nasional. PMTB menggambarkan investasi fisik domestik yang telah direalisasikan pada suatu tahun tertentu dalam bentuk berbagai jenis barang kapital, seperti: bangunan, mesin-mesin, alat-alat transportasi, dan barang modal lainnya; sedangkan inventori/stok meliputi output setengah jadi, atau input yang belum digunakan, termasuk juga barang jadi yang belum dijual. Inventori/stok termasuk dalam modal kerja yang merupakan bagian investasi yang direncanakan. Perubahan inventori merupakan selisih antara stok akhir dengan stok awal pada suatu periode tertentu.

Investasi dapat dibedakan menjadi tiga jenis yaitu: fisik, finansial, dan sumber daya manusia (SDM). Investasi yang berwujud fisik dapat berupa: jalan, jembatan, gedung, kantor, mesin-mesin, mobil dan sebagainya. Investasi finansial dapat berupa: pembelian surat berharga, pembayaran premi asuransi, penyertaan modal dan investasi keuangan lainnya. Sedangkan investasi SDM dapat berupa pendidikan dan pelatihan. Dalam kajian ini, lebih ditekankan pada investasi fisik.

Konsep investasi yang digunakan dalam penghitungan ICOR mengacu pada konsep ekonomi nasional. Pengertian investasi adalah pembentukan barang modal tetap (*fixed capital formation*) yang terdiri dari: tanah, gedung/konstruksi, mesin dan perlengkapannya, kendaraan, dan barang modal lainnya. Sementara itu, nilai pembentukan modal mencakup:

1. Pembelian barang baru dan barang bekas dari luar negeri,
2. Pembuatan/perbaikan besar yang dilakukan pihak lain,
3. Pembuatan/perbaikan besar yang dilakukan sendiri,

4. Penjualan barang modal bekas.

Total nilai investasi diperoleh dari penjumlahan seluruh pembelian barang modal baru/bekas, pembuatan/perbaikan besar yang dilakukan oleh pihak lain dan sendiri dikurangi penjualan barang modal bekas.

2.1.1. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)

PMTB didefinisikan sebagai penambahan dan pengurangan aset tetap pada suatu unit produksi, dalam kurun waktu tertentu. Penambahan barang modal mencakup pengadaan, pembuatan, pembelian, sewa beli (*financial leasing*) barang modal baru dari dalam negeri serta barang modal baru dan bekas dari luar negeri (termasuk perbaikan besar, transfer atau barter barang modal), dan pertumbuhan aset sumberdaya hayati yang dibudidaya. Sedangkan pengurangan barang modal mencakup penjualan, transfer atau barter, dan sewa beli (*financial leasing*) barang modal bekas pada pihak lain. Pengecualian kehilangan yang disebabkan oleh bencana alam tidak dicatat sebagai pengurangan.

Barang modal mempunyai usia pakai lebih dari satu tahun, serta akan mengalami penyusutan sepanjang usia pakainya. Istilah "bruto" mengindikasikan bahwa di dalamnya masih mengandung unsur penyusutan. Penyusutan atau konsumsi barang modal (*Consumption of Fixed Capital*) menggambarkan penurunan nilai barang modal yang digunakan dalam proses produksi secara normal selama satu periode.

Secara lebih rinci PMTB terdiri dari:

1. Penambahan dikurangi pengurangan aset (harta) baik barang baru maupun barang bekas, seperti bangunan tempat tinggal, bangunan bukan tempat tinggal, bangunan lainnya, mesin dan perlengkapan, alat transportasi, aset tumbuhan dan hewan yang dibudidayakan (*cultivated asset*), produk kekayaan intelektual (*intellectual property products*), dan sebagainya;
2. Biaya alih kepemilikan aset nonfinansial yang tidak diproduksi, seperti lahan dan aset yang dipatenkan;
3. Perbaikan besar aset, yang bertujuan meningkatkan kapasitas produksi dan usia pakainya (seperti overhaul mesin produksi, reklamasi pantai, pembukaan, pengeringan dan pengairan hutan, serta pencegahan banjir dan erosi).

PMTB dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. PMTB menurut jenis barang modal,
2. PMTB menurut lapangan usaha/sektor,
3. PMTB menurut institusi.

https://sulsel.bps.go.id

PMTB menurut jenis barang modal

PMTB menurut jenis barang modal dapat dibedakan atas:

1. Pembentukan modal berupa bangunan, yaitu: bangunan tempat tinggal, bangunan bukan tempat tinggal, dan bangunan lainnya seperti: jalan raya, instalasi listrik, jaringan komunikasi, bendungan, pelabuhan, dan sebagainya.
2. Pembentukan modal berupa mesin, seperti: mesin pertanian, mesin pertambangan, mesin industri, dan alat perabot serta perlengkapan untuk kantor, hotel, dan restoran.
3. Pembentukan modal berupa alat angkutan seperti: mobil, bus, truk, kapal laut, pesawat, sepeda motor, dan sebagainya.
4. Barang modal lainnya seperti: perluasan hutan; pengembangan/perluasan lahan; penanaman kembali hutan; ternak untuk pembiakan, pemerahan susu atau sebagai alat angkutan; perluasan areal pertambangan; dan sebagainya.

PMTB menurut Lapangan Usaha

Klasifikasi PMTB menurut lapangan usaha adalah sebagai berikut:

1. Pertanian, Kehutanan & Perikanan
2. Pertambangan dan penggalian
3. Industri pengolahan
4. Pengadaan Listrik & Gas
5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah & Daur Ulang
6. Konstruksi
7. Perdagangan Besar & Eceran; Reparasi Mobil & Sepeda Motor
8. Transportasi & Pergudangan
9. Penyediaan Akomodasi & Makan Minum
10. Informasi & Komunikasi
11. Jasa Keuangan & Asuransi
12. Real Estate
13. Jasa Perusahaan
14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan Sosial Wajib
15. Jasa Pendidikan
16. Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial
17. Jasa lainnya

https://sulsel.bps.go.id

PMTB menurut Institusi

PMTB menurut institusi dibedakan atas tiga kelompok berikut:

1. Pemerintah. Yang dimaksud dengan pemerintah disini adalah pemerintah yang menyelenggarakan *general administration*, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pengeluaran PMTB oleh pemerintah misalnya untuk membangun gedung kantor, pembelian mesin-mesin, komputer untuk menyelenggarakan tugas pemerintah sebagai *administration*, termasuk juga bila pemerintah mengeluarkan biaya untuk kepentingan masyarakat yang bersifat infrastruktur, seperti: jalan raya, pembangunan irigasi, dan sebagainya.
2. Korporasi/Perusahaan Swasta termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Dalam kategori ini hanya pengeluaran investasi yang benar-benar dikuasai BUMN/BUMD, tetapi tidak termasuk pengeluaran biaya oleh pemerintah pada butir a. di atas. Kegiatan yang dicakup perusahaan meliputi sektor finansial dan nonfinansial.
3. Rumah tangga dan Lembaga Swasta Nirlaba. Kegiatan membangun rumah baru atau memperbaiki rumah milik sendiri secara besar-besaran dianggap sebagai bagian dari pembentukan modal. Hal ini sesuai dengan keharusan meng-imputasi sewa rumah penduduk (rumah tangga) baik milik sendiri maupun rumah dinas.

https://sulsel.bps.go.id

2.1.2. Perubahan Inventori

Dalam PDRB, komponen Perubahan Inventori merupakan bagian dari Pembentukan Modal Bruto, atau yang lebih dikenal sebagai investasi fisik yang terjadi pada kurun waktu tertentu di dalam suatu wilayah. Perubahan inventori menggambarkan bagian dari investasi yang direalisasikan dalam bentuk barang jadi, barang setengah jadi, serta bahan baku dan bahan penolong pada satu periode tertentu. Ketersediaan data perubahan inventori menjadi penting untuk memenuhi kebutuhan analisis tentang aktivitas investasi.

Pengertian sederhana dari inventori (persediaan) adalah barang yang dikuasai oleh produsen untuk tujuan diolah lebih lanjut (*intermediate consumption*) menjadi barang dalam bentuk lain, yang punya nilai ekonomi maupun nilai manfaat yang lebih tinggi. Termasuk dalam pengertian ini adalah barang yang masih dalam proses pengerjaan (*work in progress*), serta barang jadi yang belum dipasarkan dan masih dikuasai oleh pihak produsen.

Perubahan inventori adalah selisih antara nilai inventori pada akhir periode akuntansi dengan nilai inventori pada awal periode akuntansi. Perubahan inventori menjelaskan tentang perubahan posisi barang inventori, yang dapat bermakna pertambahan (tanda positif) atau pengurangan (bertanda negatif).

Inventori dapat diklasifikasikan menurut jenis barang adalah sebagai berikut:

1. Inventori menurut industri, seperti produk atau hasil perkebunan, kehutanan, perikanan, pertambangan, industri pengolahan, gas kota, air bersih, serta konstruksi;
2. Berbagai jenis bahan baku dan penolong (*material and supplies*), yaitu semua bahan, komponen atau persediaan untuk diproses lebih lanjut menjadi barang jadi;
3. Barang jadi, yaitu barang yang telah diproses tetapi belum terjual atau belum digunakan, termasuk barang yang dijual dalam bentuk yang sama seperti pada waktu dibeli;
4. Barang setengah jadi, yaitu barang-barang yang sebagian telah diolah atau belum selesai (tidak termasuk konstruksi yang belum selesai);
5. Barang dagangan yang masih dikuasai oleh pedagang besar maupun pedagang eceran untuk tujuan dijual;
6. Ternak untuk tujuan dipotong;
7. Pengadaan barang oleh pedagang untuk tujuan dijual atau dipakai sebagai bahan bakar atau persediaan; dan persediaan pada pemerintah, yang mencakup barang strategis seperti beras, kedelai, gula pasir, dan gandum.

https://sulsel.bps.go.id

2.2. Pengertian Output

Output diartikan sebagai seluruh nilai produk barang dan jasa yang mampu dihasilkan oleh berbagai sektor produksi. Dengan kata lain, output merupakan "keluaran" atau hasil yang diperoleh dari pendayagunaan seluruh faktor produksi baik berbentuk barang atau jasa seperti: tanah, tenaga kerja, modal dan kewiraswastaan. Dari segi ekonomi nasional, output merupakan nilai dari seluruh barang dan jasa yang dihasilkan oleh faktor-faktor produksi domestik dalam suatu periode tertentu.

Dari segi perusahaan, output mencakup nilai barang (komoditi) jadi yang dihasilkan selama suatu periode tertentu ditambah nilai perubahan inventori/stok barang (komoditi) yang masih dalam proses. Output yang dimaksud adalah:

1. Barang-barang yang dihasilkan.
2. Tenaga listrik yang dijual.
3. Selisih nilai stok setengah jadi.

Output ini dihitung atas dasar harga produsen, yaitu harga yang diterima oleh produsen pada tingkat transaksi pertama. Karena masih mengandung nilai penyusutan barang modal, output ini masih bersifat bruto. Untuk mendapatkan output neto atas harga pasar, output bruto atas harga pasar harus dikurangi dengan penyusutan barang modal.

Dalam pengertian ICOR, output adalah tambahan produk dari hasil kegiatan ekonomi dalam suatu periode atau nilai-nilai yang merupakan hasil pendayagunaan faktor-faktor produksi. Output ini merupakan seluruh nilai tambah atas dasar biaya faktor produksi yang dihasilkan dari seluruh kegiatan.

2.3. Pengertian Nilai Tambah

Konsep Nilai Tambah berkaitan erat dengan konsep penghitungan output. Nilai Tambah Bruto (NTB) adalah nilai seluruh balas jasa faktor produksi yang meliputi upah dan gaji, surplus usaha, penyusutan dan pajak tidak langsung (neto). Dengan kata lain, nilai tambah adalah suatu tambahan nilai pada nilai input antara yang digunakan dalam proses menghasilkan barang/jasa. Nilai input antara tersebut bertambah karena input antara tersebut telah mengalami proses produksi yang mengubahnya menjadi barang yang nilainya lebih tinggi. Sedangkan input antara mencakup nilai seluruh komoditi yang habis atau dianggap habis dalam suatu proses produksi, seperti: bahan baku, bahan bakar, pemakaian listrik, dan sebagainya. Barang yang digunakan sebagai alat dalam suatu proses produksi dan umurnya kurang dari setahun dan habis dipakai dimasukkan sebagai input antara (bukan barang modal).

Penghitungan nilai tambah bruto atas dasar harga pasar dari suatu unit produksi adalah output bruto atas dasar harga produsen dikurangi input antara atas dasar harga pasar. Karena keterbatasan data penyusutan barang modal dan pajak tak langsung, maka pendekatan nilai tambah bruto inilah yang dipakai untuk penghitungan ICOR ini.

https://sulsel.bps.go.id

2.4. Pengertian ICOR

Dalam rangka mencapai sasaran pertumbuhan ekonomi tertentu, sangat diperlukan adanya perkiraan kebutuhan investasi dengan benar. Model Harold Domar mengaitkan adanya pengaruh tambahan stok kapital terhadap output yang dikenal dengan ICOR. Perhitungan ICOR sangat dibutuhkan dalam menentukan seberapa besar kebutuhan investasi pada tingkat pertumbuhan ekonomi yang diharapkan tumbuh dan dengan ICOR dapat dilihat seberapa efisien investasi yang ditanamkan pada priode tertentu.

Incremental Capital Output Ratio (ICOR) memiliki peranan yang penting dalam teori ekonomi. ICOR atau rasio kenaikan output akibat kenaikan kapital adalah indikator ekonomi makro yang sering digunakan untuk menilai kinerja investasi di suatu negara. Kegunaan lainnya adalah untuk menghitung besarnya investasi yang dibutuhkan agar perekonomian tumbuh dengan laju yang sudah ditetapkan.

ICOR merupakan suatu besaran yang menunjukkan besarnya tambahan kapital yang dibutuhkan untuk menaikkan/menambah satu unit output dalam perekonomian suatu wilayah. Nilai ICOR diperoleh dari perbandingan antara besarnya tambahan

kapital dengan tambahan output. Karena unit kapital bentuknya berbeda-beda dan beraneka ragam sementara unit output relatif tidak berbeda, maka untuk memudahkan penghitungan keduanya dinilai dalam bentuk uang (nominal). ICOR dapat merefleksikan besarnya produktifitas kapital yang pada akhirnya menyangkut besarnya pertumbuhan ekonomi yang bisa dicapai. Tambahan kapital diperoleh dari investasi.

Hubungan ICOR dengan pertumbuhan ekonomi dikembangkan pertama kali oleh R.F. Harrod dan Evsey Domar. Profesor Evsey Domar, seorang ekonom Amerika Serikat mengembangkan suatu koefisien yang diturunkan dari suatu rumus tentang pertumbuhan ekonomi. Domar mengemukan teorinya tersebut pertama kali pada tahun 1947 dalam *American Economic Review*, sedangkan Harrod telah mengemukakannya pada tahun 1939 dalam *Economic Journal*. Teori ini sebenarnya dikembangkan oleh kedua ekonom secara sendiri – sendiri, tetapi karena inti teori tersebut sama, maka sekarang dikenal sebagai teori Harrod – Domar (Arsyad, 1988). Koefisien itu mengaitkan pertambahan kapasitas terpasang (*capital*) dengan pertumbuhan ekonomi (output).

Teori Harrod – Domar mempunyai beberapa asumsi sebagai berikut:

1. Perekonomian dalam pengerjaan penuh (*full employment*) dan barang- barang modal dalam masyarakat digunakan secara penuh.
2. Perekonomian terdiri dari dua sektor, yaitu sektor rumah tangga dan sektor perusahaan. Ini berarti dalam analisis dianggap tidak terdapat sektor pemerintah dan sektor luar negeri.
3. Besarnya tabungan masyarakat adalah proporsional dengan besarnya pendapatan nasional. Ini berarti fungsi tabungan dimulai dari titik nol.
4. Kecenderungan masyarakat untuk menabung (*marginal propensity to save* = MPS) besarannya tetap. Demikian juga rasio antara modal – output (*capital output ratio* = COR) dan rasio pertambahan modal-output (*incremental capital output ratio* = ICOR) adalah tetap (Arsyad, 1988).

Dalam model pertumbuhan Harrod – Domar mencakup persamaan sebagai berikut (Hess and Ross, 1997):

$$H1) \quad K = vY \qquad (2.1)$$

$$H2) \quad L = uY \qquad (2.2)$$

$$H3) \quad I = S \qquad (2.3)$$

$$H4) \quad S = sY \qquad (2.4)$$

$$H5) \quad \Delta L/L = n \qquad (2.5)$$

Berdasarkan persamaan (2.1) dan (2.2) dapat dirumuskan persamaan fungsi produksi sebagai berikut:

$$Y = A \min (K/v, L/u) \qquad (2.6)$$

https://sulsel.bps.go.id

keterangan:

Y = output

A = teknologi

K = stok kapital

L = jumlah tenaga kerja

I = investasi

S = jumlah tabungan

v = rasio kapital-output

u = rasio tenaga kerja-output

s = tingkat tabungan

n = tingkat pertumbuhan tenaga kerja alami

Dengan asumsi A = 1, maka untuk memperoleh perubahan output sebesar ΔY diperlukan perubahan input sebagai berikut:

$$H1') \ \Delta K = v\Delta Y \qquad (2.7)$$

$$H2') \ \Delta L = u\Delta Y \qquad (2.8)$$

Dengan membagi persamaan (2.7) dengan (2.1) dan persamaan (2.8) dengan (2.2) akan diperoleh persamaan sebagai berikut:

$$\Delta K/K = v\Delta Y/vY = \Delta Y/Y \qquad (2.9)$$

$$\Delta L/L = u\Delta Y/uY = \Delta Y/Y \qquad (2.10)$$

keterangan:

$\Delta Y/Y$ = laju pertumbuhan output

$\Delta K/K$ = laju pertumbuhan kapital

$\Delta L/L$ = laju pertumbuhan tenaga kerja

Dalam perekonomian sederhana tanpa campur tangan pemerintah dan perdagangan luar negeri, pada kondisi keseimbangan pasar barang maka I = S. Tabungan diperoleh dari output yang tidak dikonsumsi. Dengan demikian, Investasi adalah bagian output yang tidak dikonsumsi.

Dari persamaan (2.3), (2.4), dan (2.7) dapat diperoleh persamaan sebagai berikut:

$$\Delta K = I = S = sY \qquad (2.11)$$

$$v\Delta Y = \Delta K = I = S = sY \qquad (2.12)$$

$$v\Delta Y = sY \qquad (2.13)$$

$$v\Delta Y/vY = sY/vY \qquad (2.14)$$

$$\Delta Y/Y = s/v \qquad (2.15)$$

https://sulsel.bps.go.id

Beberapa kelemahan dari Teori Harrod – Domar adalah sebagai berikut:

1. Anggapan bahwa MPS dan ICOR konstan adalah anggapan yang terlalu kaku mengingat dalam jangka panjang mungkin sekali kedua variabel tersebut berubah.
2. Teori Harrod – Domar beranggapan proporsi penggunaan tenaga kerja dan modal tetap. Anggapan ini tidak dapat dipertahankan mengingat pada kenyataannya hubungan antara tenaga kerja dan modal tidak selalu dalam proporsi yang tetap.
3. Model Harrod – Domar mengabaikan perubahan-perubahan harga pada umumnya. Padahal perubahan harga selalu terjadi di setiap waktu dan sebaliknya dapat mengendalikan situasi ekonomi yang tidak stabil.
4. Asumsi bahwa suku bunga tidak berubah adalah tidak relevan dengan analisis yang bersangkutan. Suku bunga dapat berubah dan pada akhirnya akan mempengaruhi investasi.

Pada dasarnya teori tentang ICOR dilandasi oleh dua macam konsep yaitu:

1. Rasio Modal – Output atau *Capital Output Ratio* (COR) atau sering disebut sebagai *Average Capital Output Ratio* (ACOR), yaitu perbandingan antara kapital yang digunakan dengan output yang dihasilkan pada suatu periode tertentu. COR atau ACOR ini bersifat statis karena hanya menunjukkan besaran yang menggambarkan perbandingan modal dan output.
2. Rasio Modal – Output Marginal atau *Incremental Capital Output Ratio* (ICOR), yaitu suatu besaran yang menunjukkan besarnya tambahan kapital (investasi) baru yang dibutuhkan untuk menaikkan/menambah satu unit output baik secara fisik maupun secara nilai (uang). Konsep ICOR ini lebih bersifat dinamis karena menunjukkan perubahan/penambahan output sebagai akibat langsung dari penambahan kapital.

https://sulsel.bps.go.id

Dari pengertian pada butir (2) di atas, maka ICOR bisa diformulasikan sebagai berikut:

$$ICOR = \frac{\Delta K}{\Delta Y} \qquad (2.16)$$

keterangan:

ΔK = investasi, atau penambahan barang modal baru/kapasitas terpasang

ΔY = pertambahan output

Sebagai ilustrasi, jika diketahui bahwa koefisien ICOR di suatu daerah sebesar 4. Artinya untuk meningkatkan output satu unit diperlukan investasi sebesar 4 unit. Jika output di daerah itu pada tahun sebelumnya sebesar 4 triliun rupiah, maka agar output pada tahun yang akan datang tumbuh 10 persen, atau bertambah sebesar 0,4 triliun rupiah, dibutuhkan investasi sebesar 4 x Rp. 0,4 triliun = 1,6 triliun rupiah.

Dalam perkembangannya, data yang digunakan untuk menghitung ICOR bukan lagi hanya penambahan barang modal baru atau perubahan stok kapital, melainkan Investasi (I) yang ditanam baik oleh swasta maupun pemerintah sehingga rumusan ICOR dimodifikasi menjadi:

$$ICOR = \frac{I}{\Delta Y} \qquad (2.17)$$

keterangan:

I = Investasi

ΔY = perubahan output

Peningkatan output tidak hanya disebabkan oleh investasi, tetapi juga oleh faktor-faktor lain di luar investasi seperti: pemakaian tenaga kerja, penerapan teknologi, dan kemampuan kewiraswastaan. Dengan demikian, untuk melihat peranan investasi terhadap output berdasarkan konsep ICOR, maka peranan faktor-faktor selain investasi diasumsikan konstan (*ceteris paribus*).

2.5. Metode Penghitungan ICOR

Ada dua metode penghitungan ICOR yang digunakan, yaitu metode standar dan metode akumulasi investasi. Penghitungan ICOR periode 2014-2018 dibatasi hanya dengan menggunakan metode standar lag 0, lag 1, dan lag 2, sedangkan untuk metode akumulasi hanya lag 0 saja.

2.5.1. Metode Standar

Secara matematis rumus yang digunakan untuk menghitung ICOR adalah:

$$ICOR = \frac{\Delta K}{\Delta Y} \qquad (2.18)$$

keterangan:

ΔK = pertambahan kapital/barang modal baru/kapasitas terpasang

ΔY = pertambahan output

Dalam praktek, data yang diperoleh bukan penambahan barang modal baru atau penambahan kapasitas terpasang, melainkan besarnya realisasi nilai investasi yang ditanam baik oleh Pemerintah maupun Swasta. Sehingga dengan mengasumsikan ΔK = I (investasi), maka rumus (2.18) dapat dimodifikasi menjadi:

$$ICOR = \frac{I}{\Delta Y} \qquad (2.19)$$

Rumus (2.19) ini disebut dengan Gross ICOR, yaitu suatu rasio yang menunjukkan besarnya tambahan unit kapital yang diperlukan untuk memperoleh tambahan satu unit output pada suatu periode tertentu. Dalam penerapannya rumus Gross ICOR ini lebih sering dipakai karena data yang digunakan tersedia relatif lebih lengkap.

Dalam beberapa hal untuk kasus-kasus tertentu, investasi yang ditanamkan pada suatu tahun akan langsung menghasilkan tambahan output pada tahun itu juga, sehingga rumus (2.19) di atas dapat dinyatakan sebagai berikut:

$$ICOR = \frac{I_t}{(Y_t - Y_{t-1})} \qquad (2.20)$$

https://sulsel.bps.go.id

keterangan:

I_t = investasi pada tahun ke-t

Y_t = output pada tahun ke-t

Y_{t-1} = output pada tahun t-1

Rumus (2.20) di atas dapat diartikan bahwa investasi yang ditanamkan pada tahun ke-t akan menimbulkan output pada tahun t itu juga.

Pada metode standar, langkah penghitungan dilakukan terlebih dahulu dengan mencari ICOR pada masing-masing tahun untuk periode waktu t_1 s.d t_n, sehingga akan didapatkan nilai ICOR sebanyak n buah. ICOR yang dianggap dapat mewakili untuk periode waktu tersebut (t_1 s.d t_n) diperoleh dengan jalan membagi antara jumlah nilai ICOR selama periode waktu t_1 s.d t_n dengan jumlah tahun (n), atau dengan mencari rata-rata nilai ICOR selama periode t_1 sampai dengan t_n.

Prinsip dari penghitungan ICOR metode standar ini adalah rata-rata sederhana dan penulisannya secara matematis sebagai berikut:

$$ICOR = \frac{1}{n}\sum \frac{I_t}{(Y_t - Y_{t-1})} \qquad (2.21)$$

Kelemahan dari penggunaan rata-rata sederhana ini adalah jika terjadi suatu koefisien ICOR yang ekstrim pada tahun-tahun tertentu, maka koefisien ini berpengaruh pada nilai rata-rata koefisien ICOR dalam periode waktu penghitungan. Namun demikian, penggunaan metode standar ini mempunyai daya tarik lain yaitu mampu mencerminkan inefficiency yang sering terjadi dalam praktek.

https://sulsel.bps.go.id

2.5.2. Metode Akumulasi Investasi

Pendekatan penghitungan ICOR dengan metode akumulasi berdasarkan suatu anggapan bahwa timbulnya kenaikan output selama periode waktu t disebabkan karena adanya akumulasi investasi selama periode waktu t.

Perumusan ICOR dengan metode ini adalah rasio antara akumulasi investasi terhadap akumulasi peningkatan output selama periode waktu t1 sampai tn yang secara matematis dituliskan sebagai berikut:

$$ICOR = \frac{\sum I_t}{\sum (Y_t - Y_{t-1})} \qquad (2.22)$$

Kelebihan dari metode akumulasi adalah, dalam penerapannya metode ini terkandung prinsip rata-rata tertimbang. Dengan digunakannya rata-rata tertimbang, maka koefisien ICOR ekstrim yang terjadi pada tahun-tahun tertentu bisa dihindari. Tetapi, metode akumulasi ini tidak memperhitungkan kapasitas terpasang yang berlebih dan tidak dimanfaatkan secara penuh. Dengan kata lain, metode akumulasi relatif kurang mampu mencerminkan *inefficiency*, yang memang terjadi dalam praktek.

2.5.3. Time lag Investasi

Biasanya investasi yang ditanam pada tahun tertentu tidak secara langsung memberikan hasil tambahan output pada tahun itu juga, tetapi memerlukan waktu beberapa tahun lagi. Rentang waktu yang diperlukan agar penanaman investasi dapat menghasilkan tambahan output disebut *time lag* (lag).

Jika investasi yang ditanam pada tahun ke-t baru menimbulkan kenaikan output setelah s tahun, maka rumus (4) di atas (ICOR metode standar) dengan adanya faktor *time lag* dapat dimodifikasi menjadi:

$$ICOR = \frac{\sum I_t}{\sum (Y_t - Y_{t-1})} \qquad (2.22)$$

keterangan :

Time lag = 0, 1, 2, 3, 4, dst.

s = lama waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh hasil/output terhitung sejak penanaman investasi.

https://sulsel.bps.go.id

2.5.4. Koefisien ICOR Negatif

Koefisien ICOR negatif dapat terjadi jika output pada suatu waktu tertentu lebih kecil dari pada tahun sebelumnya. Penurunan output terjadi jika ada sebagian barang modal dijual, rusak atau tidak diaktifkan karena alasan tertentu. Walaupun mungkin ada penambahan barang modal baru, tetapi barang modal baru tersebut sementara belum berproduksi atau telah berproduksi tetapi output yang dihasilkan relatif sangat kecil dibandingkan dengan output tahun sebelumnya. Sehingga selisih output antara tahun ditanamkannya investasi dengan tahun sebelumnya bernilai negatif. Pada gilirannya koefisien ICOR-pun menjadi negatif. Dengan demikian, penanaman barang modal baru belum menghasilkan output secara optimal, atau bisa dikatakan investasi yang ditanamkan belum/tidak efisien pada saat itu. Tetapi jika ada penambahan/penggantian barang modal, maka tidak bisa dikatakan bahwa telah terjadi *inefficiency*. Namun demikian secara makro keadaan yang disebutkan terakhir ini jarang terjadi.

2.5.5. Koefisien ICOR yang Besar dan Positif

Koefisien ICOR yang relatif besar terjadi jika nilai investasi yang ditanamkan pada tahun tertentu relatif besar, sedangkan output yang dihasilkan lebih besar tetapi hampir sama dengan output pada tahun sebelumnya, atau tambahan output yang dihasilkan relatif kecil. Koefisien ICOR yang besar juga bisa terjadi pada lapangan usaha yang bersifat *capital intensive*.

2.5.6. Asumsi Dasar

Walaupun pertambahan output sebenarnya bukan hanya disebabkan oleh investasi, tetapi juga oleh faktor-faktor lain di luar investasi, dalam penghitungan ICOR

ini digunakan asumsi bahwa tidak ada faktor lain yang mempengaruhi output selain investasi, dengan kata lain faktor-faktor lain di luar investasi dianggap konstan (*ceteris paribus*). Jadi perubahan/kenaikan output hanya disebabkan oleh adanya perubahan kapital/investasi.

Output dari suatu kegiatan ekonomi merupakan input antara untuk kegiatan ekonomi lainnya, sehingga jika digunakan konsep output dalam penghitungan ICOR dirasakan kurang tepat karena akan terjadi penghitungan ganda (*double counting*), yaitu ouput dari suatu perusahaan akan dihitung kembali sebagai input perusahaan lainnya. Untuk menghindari hal tersebut, maka dalam penghitungan ICOR digunakan konsep Nilai Tambah.

Konsep Nilai Tambah (*Value Added*) yang digunakan dalam penghitungan ICOR ini selanjutnya dinamakan dengan istilah ICVAR (*Incremental Capital Value Added Ratio*). Meskipun demikian, ukuran ICVAR ini juga digunakan untuk memprediksi suatu rasio investasi terhadap output menurut lapangan usaha, dan bukannya terhadap nilai tambah semata.

ICOR yang disajikan telah memperhitungkan perubahan inventori (selisih stok) baik bahan baku, barang setengah jadi, maupun barang jadi. Dalam pendekatan mikro, umumnya perusahaan diasumsikan tidak melakukan penimbunan atau akumulasi stok barang untuk kelancaran produksi. Dalam pendekatan makro, perusahaan dianggap telah membuat keputusan akumulasi stok dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi yang akan datang. Misalnya, dalam hal ada kecenderungan bahan baku akan melonjak, perusahaan dapat mengambil keputusan melakukan akumulasi stok bahan baku dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi mendatang. Penghitungan ICOR di sini, menggunakan pendekatan makro, dengan menganggap perubahan inventori/stok sebagai bagian dari pembentukan modal (investasi).

Beberapa asumsi lainnya yang dipakai dalam penyusunan ICOR ini adalah:

1. Perubahan output semata-mata hanya disebabkan oleh perubahan kapital/adanya investasi.
2. Faktor-faktor lain di luar investasi, seperti pemakaian tenaga kerja, penerapan teknologi dan kemampuan wiraswasta diasumsikan konstan.

Dengan asumsi-asumsi di atas angka ICOR mempunyai keterbatasan, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Tidak mampu menjelaskan penyebab pertumbuhan ekonomi, apakah dipengaruhi oleh pertumbuhan faktor produksi atau tingkat produktivitasnya.
2. Tidak mampu menjelaskan besaran peranan faktor di luar perubahan kapital dalam penciptaan pertumbuhan ekonomi.
3. Proses penghitungan ICOR yang optimal sebaiknya menggunakan periode referensi yang panjang misalnya 10 tahun ke atas, karena pembentukan modal bersifat akumulatif. Dalam kajian ini hanya dibatasi selama periode 2012-2016.

https://sulsel.bps.go.id

Halaman ini Sengaja Dikosongkan

https://sulsel.bps.go.id

BAB III

PERKEMBANGAN PEREKONOMIAN WILAYAH MAMMINASATA

Halaman ini Sengaja Dikosongkan

https://sulsel.bps.go.id

BAB III
PERKEMBANGAN PEREKONOMIAN WILAYAH MAMMINASATA

3.1. Tinjauan Perekonomian Berdasarkan PDRB Lapangan Usaha

Besarnya peranan berbagai lapangan usaha ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa sangat menentukan struktur ekonomi suatu daerah. Struktur ekonomi yang terbentuk dari nilai tambah yang diciptakan oleh setiap lapangan usaha menggambarkan seberapa besar ketergantungan suatu daerah terhadap kemampuan berproduksi dari setiap lapangan usaha.

Tabel 3.1 Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Wilayah Mamminasata Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (persen), 2014-2018

Lapangan Usaha	2014	2015	2016	2017*	2018**
1. Pertanian, Kehutanan & Perikanan	6,74	6,92	6,99	6,98	6,70
2.Pertambangan & Penggalian	0,89	0,86	0,84	0,85	0,84
3.Industri Pengolahan	18,97	18,83	18,89	18,38	16,97
4.Pengadaan Listrik & Gas	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
5.Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah & Daur Ulang	0,21	0,19	0,18	0,17	0,17
6. Konstruksi	14,79	14,98	14,97	15,17	15,83
7.Perdagangan Besar & Eceran; Reparasi Mobil & Sepeda Motor	16,03	15,96	16,18	16,60	17,28
8.Transportasi & Pergudangan	6,35	6,57	6,92	6,70	6,74
9.Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	1,96	1,92	1,84	1,87	1,91
10.Informasi & Komunikasi	8,02	7,56	7,55	7,64	7,85
11.Jasa Keuangan & Asuransi	5,12	5,05	5,23	5,22	5,14
12. Real Estate	4,04	4,10	3,95	3,77	3,61
13. Jasa Perusahaan	0,94	0,95	0,93	0,93	0,95
14.Administrasi Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan Sosial Wajib	3,70	4,01	3,74	3,64	3,76
15. Jasa Pendidikan	7,69	7,56	7,22	7,44	7,50
16. Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial	2,38	2,35	2,36	2,40	2,42
17. Jasa lainnya	2,12	2,14	2,17	2,19	2,30
PDRB	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

* Angka sementara
** Angka sangat sementara

https://sulsel.bps.go.id

Selama lima tahun terakhir (2014-2018) struktur perekonomian wilayah Mamminasata didominasi oleh 3 (tiga) kategori lapangan usaha, diantaranya: Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor; Industri Pengolahan; dan Konstruksi.

Hal ini dapat dilihat dari peranan masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB wilayah Mamminasata.

Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB wilayah Mamminasata pada tahun 2018 dihasilkan oleh lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor, yaitu mencapai 17,28 persen (angka ini meningkat dari 16,03 persen di tahun 2014). Selanjutnya lapangan usaha Industri Pengolahan sebesar 16,97 persen (turun dari 18,97 persen di tahun 2014). Berikutnya lapangan usaha Konstruksi sebesar 15,83 persen (naik dari 14,79 persen di tahun 2014).

Wilayah Mamminasata yang terdiri dari Kota Makassar, Kabupaten Gowa, Kabupaten Maros, dan Kabupaten Takalar merupakan wilayah pusat aktivitas perekonomian untuk Sulawesi Selatan. Kota Makassar yang merupakan ibukota provinsi berbatasan langsung dengan Kabupaten Gowa dan Maros, sehingga imbas dari padatnya aktivitas perekonomian di Kota Makassar turut andil dalam perekonomian dua kabupaten tersebut.

Sama seperti wilayah Mamminasata, peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Kota Makassar pada tahun 2018 didominasi oleh lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor, yaitu mencapai 19,82 persen (naik dari tahun 2014 sebesar 18,28 persen). Selanjutnya lapangan usaha Industri Pengolahan sebesar 18,34 persen (turun dari 20,30 persen di tahun 2014). Selanjutnya adalah lapangan usaha Konstruksi sebesar 17,95 persen (naik dari 16,86 persen di tahun 2014).

Kabupaten Gowa yang berbatasan langsung dengan Makassar memiliki struktur ekonomi yang berbeda dengan Kota Makassar. Hampir sepertiga dari perekonomian Kabupaten Gowa masih mengandalkan dari lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan yaitu sebesar 29,11 persen di tahun 2018 (turun dari 32,29 persen di tahun 2014), diikuti oleh lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor dengan peranan yang cukup jauh berbeda dengan Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, yakni hanya sebesar 12,72 persen (naik dari 11,22 persen di tahun 2014). Selanjutnya adalah lapangan usaha Konstruksi dengan peranan sebesar 11,27 persen (naik dari 10,10 persen di tahun 2014).

Meskipun perekonomian Kabupaten Gowa kontribusi terbesar masih dari lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, namun jika dilihat perkembangannya setiap tahunnya memiliki kecenderungan yang terus menurun. Sebaliknya, lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor dan Kontruksi dari tahun ke tahun menunjukan kontribusi yang semakin meningkat. Sebagai wilayah penyangga pusat ibukota provinsi (Kota Makassar), wajar terjadi pergeseran struktur perekonomian dari sektor primer (pertanian dan pertambangan/penggalian) ke sektor sekunder (industri dan kontruksi) atau tersier (perdagangan dan jasa-jasa).

https://sulsel.bps.go.id

Tabel 3.2 Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kab Gowa Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (persen), 2014-2018

Lapangan Usaha	2014	2015	2016	2017*	2018**
1. Pertanian, Kehutanan & Perikanan	32,29	31,61	31,00	30,09	29,11
2.Pertambangan & Penggalian	3,42	3,89	4,27	4,37	4,57
3.Industri Pengolahan	6,66	6,62	6,63	6,72	6,51
4.Pengadaan Listrik & Gas	0,14	0,11	0,12	0,13	0,13
5.Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah & Daur Ulang	0,13	0,12	0,11	0,11	0,11
6. Konstruksi	10,10	10,23	10,42	10,67	11,27
7.Perdagangan Besar & Eceran; Reparasi Mobil & Sepeda Motor	11,22	11,19	11,67	12,31	12,72
8.Transportasi & Pergudangan	1,56	1,74	1,67	1,64	1,63
9.Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	2,46	2,39	2,36	2,43	2,45
10.Informasi & Komunikasi	8,41	7,75	7,78	7,86	8,00
11.Jasa Keuangan & Asuransi	2,53	2,54	2,67	2,56	2,50
12. Real Estate	7,61	8,44	8,53	8,41	8,29
13. Jasa Perusahaan	0,12	0,11	0,11	0,11	0,12
14.Administrasi Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan Sosial Wajib	5,93	5,89	5,53	5,34	5,22
15. Jasa Pendidikan	4,28	4,16	3,93	3,95	4,00
16. Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial	1,74	1,80	1,81	1,83	1,85
17. Jasa lainnya	1,39	1,40	1,38	1,45	1,51
PDRB	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

* Angka sementara
** Angka sangat sementara

https://sulsel.bps.go.id

Kabupaten lain yang juga berbatasan langsung dengan Kota Makassar adalah Kabupaten Maros. Akan tetapi, struktur perekonomian Kabupaten Maros cukup berbeda dengan Kota Makassar dan Kabupaten Gowa. Bandara Internasional Sultan Hasanuddin yang merupakan bandara terbesar di Indonesia Timur berada di Kabupaten Maros yang menyebabkan struktur perekonomian Kab Maros sebagian besar disumbang oleh Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan yaitu sekitar 41,50 persen di tahun 2018 (naik dari tahun 2014 sebesar 37,62 persen). Lapangan Usaha Industri Pengolahan menempati posisi kedua penyumbang perekonomian di Kabupaten Maros yaitu sekitar 17,09 persen (turun dari 20,52 persen di tahun 2014), diikuti oleh Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 15,22 persen (turun dari 15,72 persen di tahun 2014).

Tabel 3.3 Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Maros Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (persen), 2014-2018

Lapangan Usaha	2014	2015	2016	2017*	2018**
1. Pertanian, Kehutanan & Perikanan	15,72	15,87	15,16	15,72	15,22
2.Pertambangan & Penggalian	6,73	6,33	6,06	6,22	6,34
3.Industri Pengolahan	20,52	19,73	18,17	18,37	17,09
4.Pengadaan Listrik & Gas	0,06	0,05	0,05	0,05	0,05
5.Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah & Daur Ulang	0,09	0,09	0,08	0,09	0,09
6. Konstruksi	6,00	6,21	6,33	6,77	7,27
7.Perdagangan Besar & Eceran; Reparasi Mobil & Sepeda Motor	2,87	2,79	2,53	2,59	2,69
8.Transportasi & Pergudangan	37,62	38,86	41,86	40,47	41,50
9.Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	0,34	0,32	0,30	0,32	0,33
10.Informasi & Komunikasi	1,10	1,05	1,04	1,09	1,08
11.Jasa Keuangan & Asuransi	1,44	1,34	1,30	1,26	1,25
12. Real Estate	1,32	1,23	1,19	1,20	1,21
13. Jasa Perusahaan	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
14.Administrasi Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan Sosial Wajib	3,58	3,64	3,56	3,51	3,54
15. Jasa Pendidikan	1,55	1,47	1,37	1,35	1,35
16. Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial	0,66	0,65	0,62	0,61	0,61
17. Jasa lainnya	0,36	0,36	0,35	0,36	0,38
PDRB	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

* Angka sementara
** Angka sangat sementara

https://sulsel.bps.go.id

Selain Kota Makassar, Kabupaten Gowa, dan Kabupaten Maros, kabupaten lain yang tergabung dalam Wilayah Mamminasata adalah Kabupaten Takalar. Struktur ekonomi Kabupaten Takalar hampir mirip dengan Kabupaten Gowa yaitu share Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan merupakan yang terbesar, akan tetapi untuk Kabupaten Takalar, peranan Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan mencapai setengah dari perekonomian Kabupaten Takalar yaitu sebesar 50,24 persen di tahun 2018 (naik dari tahun 2014 sebesar 49,00 persen), diikuti oleh Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor sebesar 12,18 persen (naik dari 11,87 persen di tahun 2014).

Jika melihat peranan masing-masing lapangan usaha di Wilayah Maminasata, Kota Makassar memiliki struktur yang paling mirip dengan Wilayah Mamminasata. Hal ini terjadi karena share PDRB Kota Makassar terhadap Wilayah Mamminasata merupakan yang terbesar lebih dari dua per tiganya, yakni mencapai 76,32 persen pada tahun 2018 yang menunjukkan dominasi Kota Makassar terhadap Wilayah Mamminasata. Sepanjang tahun 2014-2018, share Kota makassar terhadap Wilayah Mamminasata cenderung berfluktuasi dengan nilai di atas 75 persen.

Tabel 3.4 *Share* Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota terhadap Wilayah Mamminasata Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (persen), 2014-2018

Lapangan Usaha	2014	2015	2016	2017*	2018**
1. Pertanian, Kehutanan & Perikanan	15,72	15,87	15,16	15,72	15,22
2.Pertambangan & Penggalian	6,73	6,33	6,06	6,22	6,34
3.Industri Pengolahan	20,52	19,73	18,17	18,37	17,09
4.Pengadaan Listrik & Gas	0,06	0,05	0,05	0,05	0,05
5.Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah & Daur Ulang	0,09	0,09	0,08	0,09	0,09
6. Konstruksi	6,00	6,21	6,33	6,77	7,27
7.Perdagangan Besar & Eceran; Reparasi Mobil & Sepeda Motor	2,87	2,79	2,53	2,59	2,69
8.Transportasi & Pergudangan	37,62	38,86	41,86	40,47	41,50
9.Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	0,34	0,32	0,30	0,32	0,33
10.Informasi & Komunikasi	1,10	1,05	1,04	1,09	1,08
11.Jasa Keuangan & Asuransi	1,44	1,34	1,30	1,26	1,25
12. Real Estate	1,32	1,23	1,19	1,20	1,21
13. Jasa Perusahaan	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
14.Administrasi Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan Sosial Wajib	3,58	3,64	3,56	3,51	3,54
15. Jasa Pendidikan	1,55	1,47	1,37	1,35	1,35
16. Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial	0,66	0,65	0,62	0,61	0,61
17. Jasa lainnya	0,36	0,36	0,35	0,36	0,38
PDRB	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

* Angka sementara
** Angka sangat sementara

https://sulsel.bps.go.id

Berbanding terbalik dengan share Kota Makassar yang sangat besar, sepertiga perekonomian Wilayah Mamminasata lainnya berasal dari Kabupaten Maros, Gowa dan Takalar. Kabupaten Maros dan Gowa berada di posisi kedua dan ketiga dengan share terhadap PDRB Wilayah Mamminasata masing-masing sebesar 10,15 persen dan 9,08 persen dan Kabupaten Takalar berada di posisi terakhir dengan share sebesar 4,44 persen di tahun 2018.

Sedangkan untuk Wilayah Mamminasata sendiri, mempunyai andil terhadap perekonomian Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 45,32 persen pada tahun 2018. Kota Makassar yang termasuk dalam Wilayah Mamminasata merupakan penyumbang share terbesar terhadap perekonomian Sulawesi Selatan.

3.2 Tinjauan Perekonomian Berdasarkan PDRB Pengeluaran

Selain penghitungan PDRB menurut pendekatan produksi, pendekatan lain yang dapat digunakan adalah penghitungan PDRB menurut pendekatan pengeluaran. Menurut pendekatan pengeluaran, PDRB adalah semua komponen permintaan akhir yang terdiri dari : pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga, pengeluaran konsumsi akhir lembaga non profit yang melayani rumah tangga, pengeluaran konsumsi akhir pemerintah, pembentukan modal tetap domestik bruto, perubahan inventori dan ekspor neto (ekspor dikurangi impor).

Tabel 3.5 Distribusi PDRB Menurut Pengeluaran, Wilayah Mamminasata Tahun 2014-2018

Komponen Pengeluaran	2014	2015	2016	2017*	2018**
Konsumsi Rumah Tangga	56,89	55,59	54,26	53,75	53,13
Konsumsi LNPRT	1,50	1,42	1,38	1,37	1,52
Konsumsi Pemerintah	10,70	10,66	9,83	9,38	9,49
PMTB	43,40	43,44	43,19	43,70	42,98
Perubahan Inventori	-1,36	2,32	1,71	0,69	0,17
Net Ekspor Antar Daerah	-11,13	-13,44	-10,36	-8,90	-7,30
PDRB	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

* Angka sementara
** Angka sangat sementara

https://sulsel.bps.go.id

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa selama periode 2014-2018, produk yang dikonsumsi di Wilayah Mamminasata sebagian besar adalah untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir rumah tangga (di atas 50 persen). Besarnya porsi pengeluaran rumah tangga tersebut merupakan faktor pendorong utama besarnya permintaan barang dan jasa di Wilayah Mamminasata. Pengeluaran untuk kapital (PMTB) juga mempunya peran relatif besar dengan kontribusi sebesar 42-44 persen. Adapun proporsi konsumsi akhir pemerintah berada pada rentang 9-11 persen. Hal ini menunjukkan bahwa peran pemerintah dalam menyerap produk domestik tidak terlalu besar. Sedangkan proporsi net ekspor antar daerah yang negatif menunjukkan bahwa jumlah ekspor antar daerah Wilayah Mamminasata lebih kecil dari jumlah impornya.

Kota Makassar, sebagai penyumbang kontribusi terbesar terhadap perekonomian Wilayah Mamminasata memiliki struktur komponen PDRB menurut pengeluaran yang sama dengan Wilayah Mamminasata. Porsi pengeluaran konsumsi rumah tangga di Kota Makassar sebesar 56,66 persen pada tahun 2014 dan mengalami sedikit penurunan hingga menjadi 52,52 persen di tahun 2018. Porsi untuk PMTB sedikit lebih besar dari Wilayah Mamminasata yaitu sekitar 47-49 persen sepanjang 2014-2018. Sedangkan peran Konsumsi Pemerintah dalam penyerapan PDRB Kota Makassar sebesar 9,45 di tahun 2018.

Tabel 3.6 Distribusi PDRB Menurut Pengeluaran, Kabupaten Gowa Tahun 2014-2018

Komponen Pengeluaran	2014	2015	2016	2017*	2018**
Konsumsi Rumah Tangga	64,61	63,71	62,32	61,83	60,99
Konsumsi LNPRT	1,49	1,44	1,39	1,37	1,49
Konsumsi Pemerintah	12,22	12,15	11,70	11,28	11,57
PMTB	31,45	32,03	32,06	32,00	31,41
Perubahan Inventori	-1,29	-1,01	-0,79	-1,17	-0,55
Net Ekspor Antar Daerah	-8,48	-8,33	-6,68	-5,32	-4,91
PDRB	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

* Angka sementara
** Angka sangat sementara

Penggunaan PDRB Kabupaten Gowa untuk memenuhi kebutuhan akhir rumah tangga, lebih besar daripada yang ada pada Wilayah Mamminasata dan Kota Makassar, yakni di atas 60 persen pada rentan 2014-2018. Hal tersebut menunjukkan bahwa proporsi besarnya permintaan barang dan jasa di Kabupaten Gowa yang digunakan untuk memenuhi konsumsi rumah tangga sedikit lebih besar dari pada Kota Makassar.

Berbanding terbalik dengan proporsi Komponen Konsumsi Rumah Tangga Kabupaten Gowa yang lebih besar dari pada Kota Makassar, proporsi pengeluaran PMTB lebih kecil dari pada Kota Makassar yakni sebesar 31,41 persen pada tahun 2018. Sedangkan proporsi untuk konsumsi pemerintah berkisar 11-12 persen.

https://sulsel.bps.go.id

Tabel 3.7 Distribusi PDRB Menurut Pengeluaran, Kabupaten Maros Tahun 2014-2018

Komponen Pengeluaran	2014	2015	2016	2017*	2018**
Konsumsi Rumah Tangga	48,87	47,87	46,32	46,95	47,45
Konsumsi LNPRT	1,03	1,04	1,00	1,01	1,07
Konsumsi Pemerintah	7,31	7,07	6,93	6,78	6,81
PMTB	20,95	20,65	20,78	22,03	21,39
Perubahan Inventori	-1,03	2,21	1,70	0,96	0,28
Net Ekspor Antar Daerah	22,88	21,16	23,26	22,27	23,00
PDRB	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

* Angka sementara
** Angka sangat sementara

Kabupaten Maros memiliki struktur komponen PDRB menurut pengeluaran yang agak berbeda dari Kota Makassar maupun Kabupaten Gowa. Walaupun produk yang dikonsumsi sebagian besar digunakan untuk memenuhi konsumsi rumah tangga, akan tetapi jumlahnya kurang dari setengah PDRB kab Maros atau hampir mencapai 50 persen. Perbedaan lain yang terlihat adalah proporsi untuk PMTB hanya berkisar 20-22 persen selama 2014-2018, lebih kecil dari proporsi PMTB di Kota Makassar dan Kabupaten Gowa. Komponen lain yang tampak berbeda adalah proporsi dari net ekspor antar daerah, di

Kabupaten Maros, komponen ini memiliki proporsi yang cukup besar yakni berkisar 21-23 persen dan bernilai positif. Ini artinya nilai ekspor antar daerah di Kabupaten Maros lebih besar dari nilai impornya.

Kabupaten lainnya dalam Wilayah Mamminasata adalah Kabupaten Takalar. Secara umum, PDRB Kabupaten Takalar yang digunakan untuk memenuhi konsumsi rumah tangga memiliki proporsi yang hampir mirip dengan Kabupaten Gowa, yaitu berkisar 60-63 persen sepanjang 2014-2018. Akan tetapi, untuk proporsi PMTB Kabupaten Takalar terdapat kemiripan dengan Kabupaten Maros, yaitu sekitar 21,65 persen di tahun 2018. Sedangkan untuk Konsumsi Pemerintah, Kabupaten Takalar memiliki share Komsumsi Pemerintah yang paling besar dibanding kabupaten lainnya di Wilayah Mamminasata. Perbedaan dengan kabupaten/kota lainnya yaitu pada proporsi net ekspor, dimana terjadi perubahan arah. Pada tahun 2014, proporsi jumlah impor lebih besar dari pada ekspor, sedangkan sejak tahun 2015-2019 yang terjadi adalah sebaliknya.

Tabel 3.8 Distribusi PDRB Menurut Pengeluaran, Kabupaten Takalar Tahun 2014-2018

Komponen Pengeluaran	2014	2015	2016	2017*	2018**
Konsumsi Rumah Tangga	63,35	61,85	60,61	60,18	60,64
Konsumsi LNPRT	1,63	1,57	1,55	1,59	1,69
Konsumsi Pemerintah	14,10	13,99	12,72	12,08	12,13
PMTB	21,30	21,43	21,15	21,19	21,66
Perubahan Inventori	0,75	0,71	0,61	0,14	-0,36
Net Ekspor Antar Daerah	-1,13	0,44	3,36	4,82	4,23
PDRB	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

* Angka sementara
** Angka sangat sementara

https://sulsel.bps.go.id

BAB IV

PERKEMBANGAN INVESTASI, ICOR, DAN KETIMPANGAN INVESTASI WILAYAH MAMMINASATA

Halaman ini Sengaja Dikosongkan

https://sulsel.bps.go.id

BAB IV
PERKEMBANGAN INVESTASI, ICOR, DAN KETIMPANGAN INVESTASI WILAYAH MAMMINASATA

4.1. Perkembangan Investasi Wilayah Mamminasata

Besarnya investasi dalam proses produksi ditentukan oleh produktivitas marginalnya. Produktivitas marginal adalah tambahan output yang diperoleh pada setiap penambahan satu unit kapital dalam proses produksi dengan faktor produksi yang lain konstan/tetap sama (ceteris paribus). Investasi akan dilakukan apabila produktivitas investasi lebih tinggi dibanding dengan tingkat bunga yang akan diterima seandainya modal itu dipinjamkan dan tidak diinvestasikan.

Perencanaan investasi sangat diperlukan agar dana yang terbatas dapat digunakan secara efektif dan efisien. Pengeluaran investasi sangat menentukan tingkat perkembangan kapital dalam perekonomian, dimana kapital akan sangat menentukan tingkat pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dalam jangka waktu yang cukup panjang.

https://sulsel.bps.go.id

Tabel 4.1 Perkembangan Nilai Investasi di Wilayah Mamminasata Tahun 2014-2018

Tahun	Harga Berlaku		Harga Konstan	
	Nilai (Miliar Rp)	Perkembangan (%)	Nilai (Miliar Rp)	Pertumbuhan (%)
2014	57.188,84	-	47.335,68	-
2015	65.410,40	14,38	51.304,77	8,38
2016	73.040,20	11,66	55.634,05	8,44
2017*	81.992,58	12,26	60.273,55	8,34
2018**	90.226,87	10,04	64.503,25	7,02

* Angka sementara
** Angka sangat sementara

Perkembangan investasi atas dasar harga berlaku di Wilayah Mamminasata pada tahun 2014-2018 selalu menunjukkan perkembangan positif, dengan rata-rata investasi per tahun sebesar Rp 73,57 triliun dengan rata-rata perkembangan mencapai 12,09 persen per tahun. Adapun berdasarkan atas harga konstan 2010, terjadi peningkatan rata- rata nilai investasi per tahun sebesar 8,05 persen dengan besaran investasi adhk 2010 rata-rata per tahun sebesar Rp 55,81 triliun. Peningkatan perkembangan investasi yang tinggi atas dasar harga berlaku terjadi pada tahun 2015, yaitu mencapai 14,38 persen dan atas dasar harga konstan 2010 terjadi di tahun 2016, yang peningkatannya mencapai 8,44 persen dan perbedaan ini terjadi karena faktor inflasi.

Nilai investasi di Kota Makassar juga sama dengan yang terjadi di Wilayah Mamminasata, yaitu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Atas dasar harga berlaku, nilai investasi di Kota Makassar tumbuh dari Rp 49,33 triliun pada tahun 2014 menjadi Rp 77,66 triliun di tahun 2018. Rata-rata investasi per tahun sebesar Rp 63,29 triliun dengan rata-rata perkembangan mencapai 12,02 persen per tahun. Perkembangan tertinggi terjadi pada tahun 2015 yakni sebesar 14,18 persen.

Tabel 4.2 Perkembangan Nilai Investasi di Kota Makassar Tahun 2014-2018

Tahun	Harga Berlaku		Harga Konstan	
	Nilai (Miliar Rp)	Perkembangan (%)	Nilai (Miliar Rp)	Pertumbuhan (%)
2014	49.328,83	-	41.062,14	-
2015	56.324,62	14,18	44.549,47	8,49
2016	62.729,18	11,37	48.365,82	8,57
2017*	70.395,09	12,22	52.378,08	8,30
2018**	77.661,66	10,32	56.196,57	7,29

* Angka sementara
** Angka sangat sementara

Jika dilihat berdasarkan adhk, nilai investasi Kota Makassar pada tahun 2014 sebesar Rp 41,06 triliun hingga mencapai Rp 56,20 triliun di tahun 2018 dengan rata-rata investasi dan perkembangan per tahun masing-masing sebesar Rp 48,51 triliun dan 8,16 persen. Berdasarkan nilai investasi yang ada, Kota Makassar merupakan penyumbang 87,12% dari total investasi di Wilayah Mamminasata pada tahun 2018.

Nilai investasi Kabupaten Gowa menurut ADHK di tahun 2018 yaitu sebesar Rp 4,09 triliun. Nilai ini mengalami peningkatan dari Rp 3,11 triliun di tahun 2014. Rata-rata investasi yang terjadi setiap tahunnya selama periode 2014-2018 adalah sebesar Rp 3,61 triliun. Adapun pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2015 yakni sebesar 8,12%.

Tabel 4.3 Perkembangan Nilai Investasi di Kabupaten Gowa Tahun 2014-2018

Tahun	Harga Berlaku		Harga Konstan	
	Nilai (Miliar Rp)	Perkembangan (%)	Nilai (Miliar Rp)	Pertumbuhan (%)
2014	3.787,55	-	3.108,24	-
2015	4.404,98	16,30	3.360,55	8,12
2016	4.960,80	12,62	3.598,81	7,09
2017*	5.501,78	10,91	3.884,84	7,95
2018**	5.988,15	8,84	4.085,72	5,17

* Angka sementara
** Angka sangat sementara

Sama seperti ADHK, tingkat perkembangan tertinggi pada ADHB terjadi di tahun 2015 yaitu sebesar 16,30 % dengan rata-rata perkembangan tiap tahun sebesar 12,17%. Atas dasar harga berlaku, nilai investasi di Kabupaten Gowa tumbuh dari Rp 3,79 triliun hingga Rp 5,99 triliun sepanjang periode 2014-2018.

https://sulsel.bps.go.id

Berbeda dengan Kota Makassar dan Kabupaten Gowa, Kabupaten Maros memiliki tingkat perkembangan nilai investasi tertinggi terjadi di tahun 2017 baik itu menurut ADHB maupun ADHK yakni sebesar 15,38% dan 9,76%.

Berdasarkan ADHB, nilai investasi di Kabupaten Maros adalah Rp 2,82 triliun pada tahun 2014 dan terus meningkat hingga Rp 4,56 triliun pada tahun 2018. Rata-rata nilai investasi setiap tahunnya sebesar Rp 3,72 triliun dan rata-rata perkembangan adalah 12,82% tiap tahun.

Tabel 4.4 Perkembangan Nilai Investasi di Kabupaten Maros Tahun 2014-2018

Tahun	Harga Berlaku		Harga Konstan	
	Nilai (Miliar Rp)	Perkembangan (%)	Nilai (Miliar Rp)	Pertumbuhan (%)
2014	2.819,65	-	2.159,25	-
2015	3.218,84	14,16	2.311,47	7,05
2016	3.711,28	15,30	2.496,26	7,99
2017*	4.282,02	15,38	2.740,00	9,76
2018**	4.558,04	6,45	2.872,51	4,84

* Angka sementara
** Angka sangat sementara

Sedangkan menurut ADHK, nilai investasi di Kabupaten Maros meningkat dari Rp 2,16 triliun di tahun 2014 menjadi Rp 2,87 triliun di tahun 2018. Rata-rata nilai investasi per tahun sebesar Rp 2,52 triliun dan rata-rata perkembangannya sebesar 7,41%.

Jika dibandingkan dengan Kabupatenupaten/kota lainnya, Kabupaten Takalar memiliki nilai investasi terendah yaitu hanya sebesar Rp 2,02 triliun ADHB pada tahun 2018. Nilai ini telah mengalami peningkatan dari tahun 2014 yang hanya sebesar Rp 1,25 triliun. Rata-rata nilai investasi Kabupaten Takalar per tahun adalah sebesar Rp 1,64 triliun dan rata-rata perkembangan sebesar 12,70% per tahun. Perkembangan nilai investasi terbesar terjadi pada tahun 2015 yaitu mencapai 16,69 %.

Berdasarkan harga konstan, nilai investasi Kabupaten Takalar hanya sebesar Rp 1,01 triliun di tahun 2014 yang mengalami peningkatan setiap tahunnya hingga di tahun 2018 menjadi Rp 1,35 triliun. Perkembangan nilai investasi tertinggi terjadi di tahun 2017 sebesar 8,31% dengan rata-rata sebesar 7,60% per tahun. Rata-rata nilai investasi per tahun untuk Kabupaten Takalar hanya sekitar Rp 1,18 triliun.

Tabel 4.5 Perkembangan Nilai Investasi di Kabupaten Takalar Tahun 2014-2018

Tahun	Harga Berlaku		Harga Konstan	
	Nilai (Miliar Rp)	Perkembangan (%)	Nilai (Miliar Rp)	Pertumbuhan (%)
2014	1.252,82	-	1.006,05	-
2015	1.461,96	16,69	1.083,28	7,68
2016	1.638,94	12,11	1.173,17	8,30
2017*	1.813,68	10,66	1.270,63	8,31
2018**	2.019,03	11,32	1.348,46	6,12

* Angka sementara
** Angka sangat sementara

https://sulsel.bps.go.id

Peranan nilai investasi Kabupatenupaten/kota terhadap Wilayah Mamminasata menunjukkan perbedaan yang signifikan. Kota Makassar merupakan kota penyumbang terbesar nilai investasi di Wilayah Mamminasata yaitu sekitar 87,12% di tahun 2018. Peranan ini mengalami sedikit peningkatan dari tahun 2014, kecuali pada tahun 2017 yang sedikit berkurang peranannya.

Tabel 4.6 *Share* Nilai Investasi Kabupatenupaten/Kota terhadap Wilayah Mamminasata Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2014-2018

Kabupaten	2014	2015	2016	2017*	2018**
Kota Makassar	86,75	86,83	86,94	86,90	87,12
Kabupaten Gowa	6,57	6,55	6,47	6,45	6,33
Kabupaten Maros	4,56	4,51	4,49	4,55	4,45
Kabupaten Takalar	2,13	2,11	2,11	2,11	2,09
Wilayah Maminasata	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

* Angka sementara
** Angka sangat sementara

https://sulsel.bps.go.id

Di posisi kedua adalah Kabupaten Gowa yang menyumbang 6,33% dari total nilai investasi di Wilayah Mamminasata tahun 2018, peranan Kabupaten Gowa mengalami penurunan sepanjang 2014-2018. Sedangkan Kabupaten Maros dan Kabupaten Takalar hanya memiliki peran masing-masing sebesar 4,45% dan 2,09% pada tahun 2018.

4.2 ICOR 2014-2018

Koefisien ICOR dalam publikasi ini dihitung berdasarkan nilai investasi dan output (PDRB) yang dinilai dalam harga konstan agar pengaruh fluktuasi harga dalam ukuran ICOR dapat dihilangkan (atas dasar harga konstan 2010). Rata-rata koefisien ICOR Wilayah Mamminasata apabila dihitung berdasarkan metode akumulasi periode 2014-2018 untuk lag 0 sebesar 6,15; lag 1 sebesar 5,61; lag 2 sebesar 5,13. Koefisien ICOR di tahun 2018 sebesar 5,99 pada lag 0 memberikan informasi bahwa untuk meningkatkan 1 unit output dibutuhkan penambahan modal atau investasi sebanyak 5,99 unit, dimana penanaman investasi dan peningkatan output terjadi pada kurun waktu (tahun) yang sama. Angka tersebut dapat juga diartikan untuk meningkatkan PDRB (ADHK) sebesar Rp 1 M dibutuhkan investasi sebesar Rp 5,99 M.

Tabel 4.7 Koefisien ICOR Wilayah Mamminasata Tahun 2014-2018

Tahun	Lag 0	Lag 1	Lag 2
2014	6,58	5,82	5,02
2015	6,31	5,44	5,19
2016	5,90	5,63	5,17
2017	6,10	5,60	-
2018	5,99	-	-
Metode Akumulasi	6,15	5,61	5,13
Metode Standar	6,18	5,62	5,13

Adapun jika berdasarkan metode standar rata-rata koefisien ICOR Wilayah Mamminasata untuk lag 0 sebesar 6,18; lag 1 sebesar 5,62; lag 2 sebesar 5,13. Dari dua metode penghitungan rata-rata koefisien ICOR baik metode akumulasi maupun standar, keduanya menghasilkan nilai dengan pola yang sama dan dengan selisih yang sangat kecil. Hal ini menunjukkan bahwa selama periode tahun 2014-2018 tidak terjadi fluktuasi kondisi ekonomi yang ekstrim. Sedangkan pola besaran koefisien icor nya, yakni jika lag semakin besar maka nilai rata-rata koefisien ICOR juga semakin kecil. Nilai tersebut dapat diartikan bahwa investasi yang ditanamkan di Wilayah Mamminasata belum dapat langsung menimbulkan kenaikan output pada tahun yang sama saat investasi ditanamkan tetapi masih memerlukan waktu beberapa tahun lagi. Selain itu bisa disimpulkan bahwa akumulasi efek dari investasi yang ditanamkan pada setiap tahun selama periode 2014-2018 makin efisien dalam meningkatkan nilah tambah bruto.

Besarnya koefisien ICOR di tahun 2014-2018 sangat dipengaruhi oleh besarnya nilai investasi yang ditanamkan pada saat itu dan belum maksimalnya efek yang ditimbulkan dalam mendongkrak nilai tambah bruto pada tahun yang sama. Koefisien yang cukup besar di tahun tersebut bukan berarti investasi yang ditanamkan belum atau tidak produktif, tetapi perlu waktu beberapa tahun ke depan untuk mampu menghasilkan nilai tambah sebagai hasil dari penanaman investasi pada tahun tersebut.

Bila dilihat berdasarkan Kabupaten upaten/kota pembentuk Wilayah Mamminasata, rata-rata koefisien ICOR Kota Makassar apabila dihitung berdasarkan metode akumulasi periode 2014-2018 lebih besar daripada rata-rata koefisien ICOR Wilayah Mamminasata untuk lag 0 yakni sebesar 6,80; lag 1 sebesar 6,22; lag 2 sebesar 5,64. Koefisien ICOR di tahun 2018 sebesar 6,43 pada lag 0 memberikan informasi bahwa untuk meningkatkan 1 unit output dibutuhkan penambahan modal atau investasi sebanyak 6,43 unit, dimana penanaman investasi dan peningkatan output terjadi pada kurun waktu (tahun) yang sama. Angka tersebut dapat juga diartikan untuk meningkatkan PDRB (ADHK) sebesar Rp 1 M dibutuhkan investasi sebesar Rp 6,43 M.

https://sulsel.bps.go.id

Tabel 4.8 Koefisien ICOR Kota Makassar Tahun 2014-2018

Tahun	Lag 0	Lag 1	Lag 2
2014	7,22	6,59	5,76
2015	7,14	6,25	5,66
2016	6,78	6,15	5,53
2017	6,66	5,99	-
2018	6,43	-	-
Metode Akumulasi	6,80	6,22	5,64
Metode Standar	6,85	6,24	5,65

Jika dilihat berdasarkan metode standar, rata-rata koefisien ICOR Kota Makassar untuk lag 0 sebesar 6,85; lag 1 sebesar 6,24; lag 2 sebesar 5,65. Dari dua metode penghitungan rata-rata koefisien ICOR baik metode akumulasi maupun standar, keduanya tidak menunjukkan perbedaan hasil yang signifikan atau dengan kata lain hasilnya hampir sama. Sama halnya dengan Wilayah Mamminasata, untuk Kota Makassar terjadi penurunan nilai rata-rata koefisien ICOR jika lagnya semakin besar. Hal ini menunjukkan bahwa investasi yang dilakukan di Kota Makassar belum dapat langsung menimbulkan kenaikan output di tahun yang sama dengan investasi tersebut ditanamkan, akan tetapi membutuhkan waktu beberapa tahun lagi.

Dibandingkan dengan rata-rata koefisien ICOR Wilayah Mamminasata, secara umum nilai koefisien ICOR di Kota Makassar lebih besar. Hal ini menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 2014-2018 perekonomian di Wilayah Mamminasata lebih efisien daripada Kota Makassar.

Kabupaten Gowa yang berbatasan langsung dengan Kota Makassar tenyata memiliki nilai koefisien ICOR yang jauh lebih kecil daripada Wilayah Mamminasata maupun Kota Makassar. Rata-rata koefisien ICOR Kabupaten Gowa apabila dihitung berdasarkan metode akumulasi periode 2014-2018 untuk lag 0 yakni sebesar 4,81; lag 1 sebesar 4,50; lag 2 sebesar 4,12. Koefisien ICOR di tahun 2018 sebesar 4,80 pada lag 0 memberikan informasi bahwa untuk meningkatkan 1 unit output dibutuhkan penambahan modal atau investasi sebanyak 4,80 unit, dimana penanaman investasi dan peningkatan output terjadi pada kurun waktu (tahun) yang sama. Angka tersebut dapat juga diartikan untuk meningkatkan PDRB (ADHK) sebesar Rp 1 M dibutuhkan investasi sebesar Rp 4,80 M. sedangkan untuk metode standar, hasilnya tidak berbeda dengan metode akumulasi.

https://ejurnal.bps.go.id

Tabel 4.9 Koefisien ICOR Kota Makassar Tahun 2014-2018

Tahun	Lag 0	Lag 1	Lag 2
2014	4,78	4,71	3,96
2015	5,09	4,28	4,17
2016	4,58	4,47	4,23
2017	4,82	4,56	-
2018	4,80	-	-
Metode Akumulasi	4,81	4,50	4,12
Metode Standar	4,81	4,50	4,12

Selain Kabupaten Gowa, Kabupaten Maros juga berbatasan langsung dengan Kota Makassar dan juga memiliki nilai koefisien ICOR lebih kecil dari Wilayah Mamminasata. Rata-rata koefisien ICOR Kabupaten Maros apabila dihitung berdasarkan metode akumulasi periode 2014-2018 untuk lag 0 yakni sebesar 3,19; lag 1 sebesar 2,78; lag 2 sebesar 2,64. Koefisien ICOR di tahun 2018 sebesar 3,63 pada lag 0 memberikan informasi bahwa untuk meningkatkan 1 unit output dibutuhkan penambahan modal atau investasi sebanyak 3,63 unit, dimana penanaman investasi dan peningkatan output terjadi pada kurun waktu (tahun) yang sama. Angka tersebut dapat juga diartikan untuk meningkatkan PDRB (ADHK) sebesar Rp 1 M dibutuhkan investasi sebesar Rp 3,63 M. angka ini jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan Kota Makassar (Rp 6,43 M) dan Kabupaten Gowa (Rp 4,80 M).

Tabel 4.10 Koefisien ICOR Kabupaten Maros Tahun 2014-2018

Tahun	Lag 0	Lag 1	Lag 2
2014	4,75	2,54	2,08
2015	2,72	2,23	2,84
2016	2,41	3,07	3,16
2017	3,36	3,47	-
2018	3,63	-	-
Metode Akumulasi	3,19	2,78	2,64
Metode Standar	3,38	2,83	2,69

Berdasarkan metode standar, rata-rata koefisien ICOR Kabupaten Maros untuk lag 0 sebesar 3,38; lag 1 sebesar 2,83; lag 2 sebesar 2,69. Dari dua metode penghitungan rata-rata koefisien ICOR baik metode akumulasi maupun standar, keduanya tidak menunjukkan perbedaan hasil yang signifikan atau dengan kata lain hasilnya hampir sama. Di Kabupaten Maros terjadi penurunan nilai rata-rata koefisien ICOR jika lagnya semakin besar. Hal ini menunjukkan bahwa investasi yang dilakukan di Kabupaten Maros belum dapat langsung menimbulkan kenaikan output di tahun yang sama dengan

https://jurnal.bps.go.id

investasi tersebut ditanamkan, akan tetapi membutuhkan waktu beberapa tahun lagi.

Kabupaten Takalar merupakan satu-satunya Kabupaten dalam Wilayah Mamminasata yang tidak berbatasan langsung dengan Kota Makassar. Dibandingkan Kabupaten/kota lainnya dalam Wilayah Mamminasata, Kabupaten Takalar memiliki nilai koefisien ICOR terkecil. Rata-rata koefisien ICOR Kabupaten Takalar apabila dihitung berdasarkan metode akumulasi periode 2014-2018 untuk lag 0 yakni sebesar 2,87; lag 1 sebesar 2,76; lag 2 sebesar 2,59. Koefisien ICOR di tahun 2018 sebesar 3,49 pada lag 0 memberikan informasi bahwa untuk meningkatkan 1 unit output dibutuhkan penambahan modal atau investasi sebanyak 4,80 unit, dimana penanaman investasi dan peningkatan output terjadi pada kurun waktu (tahun) yang sama. Angka tersebut dapat juga diartikan untuk meningkatkan PDRB (ADHK) sebesar Rp 1 M dibutuhkan investasi sebesar Rp 3,49 M.

Tabel 4.11 Koefisien ICOR Kabupaten Takalar Tahun 2014-2018

Tahun	Lag 0	Lag 1	Lag 2
2014	2,49	2,63	2,12
2015	2,83	2,29	2,72
2016	2,48	2,94	3,04
2017	3,19	3,29	-
2018	3,49	-	-
Metode Akumulasi	2,87	2,76	2,59
Metode Standar	2,89	2,79	2,63

https://sulsel.bps.go.id

Jika dilihat berdasarkan metode standar, rata-rata koefisien ICOR Kabupaten Takalar untuk lag 0 sebesar 2,89; lag 1 sebesar 2,79; lag 2 sebesar 2,63. Dari dua metode penghitungan rata-rata koefisien ICOR baik metode akumulasi maupun standar, memiliki hasil yang hampir sama.

Nilai koefisien ICOR pada Kabupaten Takalar yang lebih rendah daripada Kabupatenuapten/kota lainnya di Wilayah Mamminasata menunjukkan bahwa semakin besar produktivitas dan efisiensi dari investasi yang ditanamkan. Selanjutnya, dengan nilai investasi yang sama akan menghasilkan laju pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi untuk Kabupaten Takalar.

4.3 Ketimpangan Investasi Wilayah

Ukuran ketimpangan investasi yang digunakan untuk menganalisis seberapa besar kesenjangan antarwilayah/daerah adalah dengan melalui perhitungan indeks Williamson. Dasar perhitungannya adalah dengan menggunakan nilai investasi per kapita dalam kaitannya dengan jumlah penduduk per daerah. Kesenjangan investasi antar Kabupaten/kota di Wilayah Mamminasata juga dilakukan dengan menggunakan Indeks Williamson.

Indeks Williamson yang diperoleh terletak antara 0 (nol) sampai 1 (satu). Jika nilai indeks Williamson mendekati 0 maka ketimpangan distribusi investasi antar Kabupaten/kota di Wilayah Mamminasata adalah rendah atau pertumbuhan ekonomi antara daerah cenderung merata. Jika ketimpangan Williamson mendekati 1 maka ketimpangan distribusi investasi antar Kabupaten/kota di Wilayah Mamminasata adalah tinggi. Perbedaan investasi yang tinggi sudah bisa terlihat dari tabel 4.12, nilai investasi perkapita tertinggi adalah Kota Makassar dengan nilai Rp 51,49 miliar dan terendah Kabupaten Takalar sebesar Rp 6,82 miliar di tahun 2018.

https://sulsel.bps.go.id

Tabel 4.12 Nilai Investasi Perkapita Kabupaten/KotaTahun 2014-2018 (Miliar rupiah)

Kabupaten/Kota	2014	2015	2016	2017*	2018**
Kota Makassar	34,51	38,86	42,68	47,28	51,49
Kabupaten Gowa	5,34	6,10	6,74	7,35	7,87
Kabupaten Maros	8,40	9,49	10,82	12,36	13,03
Kabupaten Takalar	4,42	5,10	5,65	6,19	6,82
Wilayah Maminasata	**20,74**	**23,37**	**25,74**	**28,50**	**30,96**
Sulawesi Selatan	**13,07**	**14,79**	**16,43**	**18,09**	**19,60**

* Angka sementara
** Angka sangat sementara

Dari hasil perhitungan indeks Williamson, Wilayah Mamminasata tahun 2018 memiliki nilai indeks williamson sebesar 1,22 (lebih besar dari 1) karena adanya Kota Makassar yang memiliki indeks Williamson sangat tinggi (outlier) dibanding Kabupaten/kota lainnya, maka berdasarkan definisi indeks ketimpangan williamson, pada tahun 2018 di Wilayah Mamminasata terjadi ketimpangan distribusi yang tinggi dengan kata lain, terjadi investasi yang tidak merata antara daerah.

Jika Kota Makassar dikeluarkan dalm penghitungan indeks williamson, maka Wilayah Minasata di tahun 2018 memiliki nilai ketimpangan williamson sebesar 0,18. Hal ini menunjukkan bahwa ketimpangan distribusi investasi antara Kabupaten Gowa, Maros dan Takalar sebenarnya cukup rendah. Sayangnya jika melihat indeks williamsom sepanjang tahun 2014-2018 yaitu 0,17; 0,18; 0,18; 0,19; 0,18 terlihat bahwa nilai ketimpangan williamson sedikit mengalami kenaikan dari tahun 2014 hingga 2017, baru di tahun 2018 mulai menunjukkan penurunan.

Halaman ini Sengaja Dikosongkan

https://sulsel.bps.go.id

BAB V
KESIMPULAN

https://sulsel.kemenag.go.id

Halaman ini Sengaja Dikosongkan

https://sulsel.bps.go.id

BAB IV
KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian tentang penghitungan ICOR Wilayah Mamminasata selama periode 2014-2018 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Selama lima tahun terakhir (2014-2018) struktur perekonomian Wilayah Mamminasata didominasi oleh 3 (tiga) kategori lapangan usaha, diantaranya: Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor (17,28 persen); Industri Pengolahan (16,97 persen); dan Konstruksi (15,83 persen).
2. Struktur perekonomian kabupaten/kota pembentuk Wilayah Mamminasata cukup bervariasi, seperti Kota Makassar yang memiliki struktur ekonomi sama dengan Wilayah Mamminasata, Kab Gowa dan Kab Takalar didominasi oleh Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, sedangkan Kab Maros sangat dipengaruhi oleh Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan.
3. Kota Makassar merupakan penyumbang terbesar PDRB Wilayah Mamminasata, mencapai 76,32 persen ditahun 2018. Disusul oleh Kab Maros (10,15 persen) dan Kab Gowa (9,08 persen). Dan di posisi terakhir adalah Kab Takalar sebesar 4,44 persen.
4. Berdasarkan PDRB Pengeluaran, PDRB Wilayah Mamminasata sebagian besar digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir rumah tangga dengan persentase di atas 50 persen. Fenomena yang sama terjadi pada Kota Makassar dan Kab Takalar. Sedangkan untuk Kab Gowa dan Kab Maros, proporsinya masih di bawah 50 persen.
5. Pada periode 2014-2018 nilai investasi atas dasar harga konstan 2010 di Wilayah Mamminasata tumbuh rata-rata per tahun sebesar 8,05 persen.
6. Kota Makassar memiliki rata-rata perkembangan nilai investasi tertinggi sepanjang periode 2014-2018 yaitu sebesar 8,16 persen dibanding kabupaten/kota di Wilayah Mamminasata lainnya.
7. Menurut share dari setiap kabupaten/kota, Kota Makassar merupakan penyumbang terbesar nilai investasi di Wilayah Mamminasata, yaitu mencapai 87,12 persen di tahun 2018.

https://sulsel.bps.go.id

8. **Rata-rata koefisien ICOR Wilayah Mamminasata dalam periode 2014-2018 menggunakan metode akumulasi diperoleh angka 6,15 pada lag 0; 5,61 pada lag 1; dan 5,13 pada lag 2. Sedangkan apabila menggunakan metode standar diperoleh nilai 6,18 pada lag 0; 5,62 pada lag 1; dan 5,13 pada lag 2. Dari kedua metode tersebut menghasilkan besaran dan pola yang relatif sama, yakni rata-rata koefisien ICOR akan semakin kecil pada lag yang semakin besar. Hal ini menunjukkan bahwa selama periode tahun 2014-2018 tidak terjadi fluktuasi kondisi ekonomi yang ekstrim. Sedangkan pola besaran koefisien ICOR menunjukkan bahwa jika lag semakin besar maka nilai rata-rata koefisien ICOR juga semakin kecil. Nilai tersebut dapat diartikan bahwa investasi yang ditanamkan di Wilayah Mamminasata belum dapat langsung menimbulkan kenaikan output pada tahun yang sama saat investasi ditanamkan tetapi masih memerlukan waktu beberapa tahun lagi.**
9. **Kab Takalar mempunyai nilai koefisien ICOR paling rendah dibandingkan kabupaten/kota lainnya di Wilayah Mamminasata selama periode 2014-2018. Berdasarkan metode akumulasi diperoleh angka 2,87 pada lag 0; 2,76 pada lag 1; dan 2,59 pada lag 2. Sedangkan jika memakai metode standar didapatkan angka 2,89 pada lag 0; 2,79 pada lag 1; dan 2,63 pada lag 2. Nilai koefisien ICOR yang lebih kecil menunjukkan bahwa dengan nilai investasi yang sama di kabupaten/kota pada Wilayah Mamminasata akan menghasilkan laju pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi untuk Kab Takalar.**
10. **Dari hasil perhitungan indeks Williamson untuk Wilayah Mamminasata tahun 2018 memiliki nilai ketimpangan williamson sebesar 1,22. Hal ini berarti terjadi ketimpangan investasi yang tinggi yaitu terjadinya investasi antara kabupaten/kota di Wilayah mamminasata yang tidak merata. Sedangkan jika Kota Makassar dikeluarkan dalam penghitungan, maka nilai ketimpangan williamson sebesar 0,18 yang menunjukkan bahwa ketimpangan investasi antara Kab Gowa, Maros dan Takalar sebenarnya cukup rendah.**

https://sulsel.bps.go.id

LAMPIRAN

https://sulsel.bps.go.id

Halaman ini Sengaja Dikosongkan

https://sulsel.bps.go.id

Lampiran 1

Produk Domestik Regional Bruto Wilayah Mamminasata Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan UsahUsaha Tahun 20142018 (miliar rupiah)

	Lapangan Usaha	2014	2015	2016	2017*	2018**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	9.478,96	10.886,65	12.165,18	13.349,42	14.285,31
B	Pertambangan dan Penggalian	1.424,35	1.649,65	1.883,46	2.116,01	2.388,32
C	Industri Pengolahan	24.291,42	27.575,72	31.100,19	33.601,30	34.731,11
D	Pengadaan Listrik, Gas	65,88	61,83	70,06	86,32	97,30
E	Pengadaan Air	272,71	285,25	298,15	325,07	352,68
F	Konstruksi	19.375,80	22.444,68	25.218,29	28.366,74	33.145,20
G	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	20.785,92	23.673,01	27.039,11	30.836,37	35.887,26
H	Transportasi dan Pergudangan	7.994,61	9.487,77	11.219,59	12.054,51	13.550,25
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2.743,90	3.069,28	3.320,90	3.729,52	4.266,77
J	Informasi dan Komunikasi	10.862,67	11.673,34	13.112,04	14.722,56	16.892,60
K	Jasa Keuangan	6.639,26	7.498,74	8.724,61	9.650,13	10.602,55
L	Real Estate	5.666,32	6.671,70	7.265,70	7.723,08	8.299,36
M,N	Jasa Perusahaan	1.197,31	1.380,29	1.513,13	1.686,04	1.925,83
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4.959,99	6.087,82	6.346,59	6.857,51	7.879,89
P	Jasa Pendidikan	10.093,22	11.341,30	12.163,19	13.880,09	15.659,10
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3.117,49	3.530,45	3.991,99	4.507,45	5.079,52
R,S,T,U	Jasa lainnya	2.811,02	3.255,37	3.696,17	4.148,29	4.861,58
	PDRB	**131.780,86**	**150.572,84**	**169.128,37**	**187.640,38**	**209.904,62**

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

https://sulsel.bps.go.id

Lampiran 2

Produk Domestik Regional Wilayah Mamminasata Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2014-2018 (miliar rupiah)

	Lapangan Usaha	2014	2015	2016	2017*	2018**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	7.462,71	7.935,91	8.540,29	9.038,67	9.481,55
B	Pertambangan dan Penggalian	1.071,60	1.202,06	1.375,93	1.614,20	1.779,48
C	Industri Pengolahan	20.225,16	21.608,87	23.242,37	24.648,51	24.747,43
D	Pengadaan Listrik, Gas	77,10	74,10	82,74	88,10	94,97
E	Pengadaan Air	223,89	224,87	229,82	246,06	262,19
F	Konstruksi	15.198,11	16.479,12	17.818,83	19.325,72	21.030,31
G	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	17.758,18	18.994,58	20.717,05	22.762,23	25.394,42
H	Transportasi dan Pergudangan	5.546,92	5.919,50	6.545,83	7.032,31	7.650,45
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2.180,20	2.315,48	2.509,28	2.730,24	3.079,52
J	Informasi dan Komunikasi	10.563,95	11.538,02	12.629,50	13.862,70	15.591,43
K	Jasa Keuangan	4.976,38	5.340,59	6.035,82	6.366,70	6.699,07
L	Real Estate	4.198,56	4.580,60	4.754,94	4.935,29	5.167,71
M,N	Jasa Perusahaan	920,55	967,40	1.025,89	1.111,70	1.224,63
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3.839,07	4.215,96	4.227,12	4.450,06	5.014,09
P	Jasa Pendidikan	8.091,57	8.720,12	9.356,30	10.256,77	11.322,44
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2.387,89	2.577,64	2.813,61	3.077,67	3.396,23
R,S,T,U	Jasa lainnya	2.206,58	2.361,82	2.577,65	2.822,85	3.204,12
	PDRB	**106.928,43**	**115.056,64**	**124.482,98**	**134.369,78**	**145.140,02**

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

https://sulsel.bps.go.id

Lampiran 3

Produk Domestik Regional Bruto Wilayah Mamminasata Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Tahun 2014-2018 (miliar rupiah)

	Komponen Pengeluaran	2014	2015	2016	2017*	2018**
1	Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga	74.970,60	83.704,69	91.764,45	100.850,18	111.526,23
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	1.974,57	2.141,34	2.332,87	2.579,79	3.185,37
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	14.106,44	16.055,89	16.618,52	17.609,57	19.929,80
4	Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	57.188,84	65.410,40	73.040,20	81.992,58	90.226,87
5	Perubahan Inventori	-1.797,54	3.490,82	2.886,67	1.299,85	353,83
6	Net Ekspor Barang dan Jasa	-14.662,05	-20.230,31	-17.514,34	-16.691,57	-15.317,48
	PDRB	**131.780,86**	**150.572,84**	**169.128,37**	**187.640,38**	**209.904,62**

* Angka sementara
** Angka sangat sementara

https://sulsel.bps.go.id

Lampiran 4

Produk Domestik Regional Bruto Wilayah Mamminasata Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran Tahun 2014-2018 (miliar rupiah)

	Komponen Pengeluaran	2014	2015	2016	2017*	2018**
1	Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga	58.596,63	61.587,53	65.175,68	69.349,33	73.344,06
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	1.502,04	1.520,93	1.576,01	1.684,00	1.950,07
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	10.537,46	11.241,07	11.041,46	11.259,31	12.017,90
4	Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	47.335,68	51.304,77	55.634,05	60.273,55	64.503,25
5	Perubahan Inventori	-1.225,72	3.001,46	2.016,32	962,27	183,71
6	Net Ekspor Barang dan Jasa	-9.817,66	-13.599,12	-10.960,54	-9.158,69	-6.858,96
	PDRB	**106.928,43**	**115.056,64**	**124.482,98**	**134.369,78**	**145.140,02**

* Angka sementara
** Angka sangat sementara

Lampiran 5

Produk Domestik Regional Bruto Kota Makassar Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan UsahaTahun 2014-2018 (miliar rupiah)

	Lapangan Usaha	2014	2015	2016	2017*	2018**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	591.92	663.72	745.15	793.15	808.43
B	Pertambangan dan Penggalian	1.68	1.59	1.42	1.24	1.10
C	Industri Pengolahan	20,380.66	23,205.87	26,407.78	28,422.31	29,380.57
D	Pengadaan Listrik, Gas	34.16	32.52	36.49	43.86	50.47
E	Pengadaan Air	240.80	252.23	263.06	284.37	307.68
F	Konstruksi	16,929.63	19,585.35	21,920.50	24,591.80	28,760.38
G	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	18,350.55	20,909.47	23,899.36	27,216.39	31,753.86
H	Transportasi dan Pergudangan	2,577.27	2,998.78	3,273.81	3,684.14	4,151.02
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,384.26	2,671.18	2,878.59	3,224.07	3,698.77
J	Informasi dan Komunikasi	9,470.99	10,199.80	11,447.60	12,848.06	14,801.74
K	Jasa Keuangan	6,043.67	6,831.50	7,949.62	8,823.37	9,706.80
L	Real Estate	4,244.60	4,944.28	5,308.90	5,569.65	5,957.04
M,N	Jasa Perusahaan	1,179.15	1,359.87	1,490.58	1,660.86	1,897.20
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,361.45	4,226.35	4,309.67	4,683.23	5,494.16
P	Jasa Pendidikan	9,284.59	10,446.24	11,208.09	12,825.50	14,484.27
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,737.06	3,092.32	3,502.58	3,967.27	4,483.77
R,S,T,U	Jasa lainnya	2,580.53	2,991.35	3,402.18	3,809.43	4,470.40
	PDRB	**100,392.98**	**114,412.42**	**128,045.37**	**142,448.70**	**160,207.66**

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

https://sulsel.bps.go.id

Lampiran 6

Produk Domestik Regional Kota Makassar Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2014-2018 (miliar rupiah)

	Lapangan Usaha	2014	2015	2016	2017*	2018**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	465.61	478.11	497.71	505.59	504.69
B	Pertambangan dan Penggalian	1.13	0.97	0.84	0.77	0.66
C	Industri Pengolahan	16,985.53	18,077.51	19,558.17	20,806.60	20,856.68
D	Pengadaan Listrik, Gas	40.13	38.24	42.29	45.00	49.36
E	Pengadaan Air	196.30	197.17	201.33	215.19	228.61
F	Konstruksi	13,284.17	14,415.64	15,585.75	16,897.85	18,397.67
G	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	15,658.93	16,762.34	18,271.24	20,112.43	22,484.33
H	Transportasi dan Pergudangan	2,105.27	2,212.73	2,312.60	2,516.61	2,737.52
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,897.32	2,014.49	2,184.96	2,375.28	2,682.32
J	Informasi dan Komunikasi	9,277.40	10,125.62	11,081.12	12,168.29	13,735.37
K	Jasa Keuangan	4,547.30	4,882.85	5,520.29	5,841.81	6,152.60
L	Real Estate	3,100.37	3,347.93	3,418.46	3,497.12	3,648.89
M,N	Jasa Perusahaan	906.04	952.18	1,009.67	1,094.12	1,205.39
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,607.64	2,905.99	2,840.63	3,004.00	3,500.85
P	Jasa Pendidikan	7,409.07	7,999.27	8,596.48	9,442.55	10,434.50
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,084.75	2,248.32	2,464.25	2,707.72	3,001.17
R,S,T,U	Jasa lainnya	2,025.86	2,168.81	2,371.84	2,595.25	2,947.80
	PDRB	**82,592.82**	**88,828.15**	**95,957.64**	**103,826.16**	**112,568.41**

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

https://sulsel.bps.go.id

Lampiran 7
Produk Domestik Regional Bruto Kota Makassar Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Tahun 2014-2018 (miliar rupiah)

	Komponen Pengeluaran	2014	2015	2016	2017*	2018**
1	Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga	56,884.13	63,262.12	69,151.95	75,942.20	84,134.00
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	1,560.29	1,674.39	1,818.57	2,011.08	2,514.86
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	10,821.47	12,327.89	12,583.77	13,318.22	15,140.81
4	Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	49,328.83	56,324.62	62,729.18	70,395.09	77,661.66
5	Perubahan Inventori	-1,548.31	3,237.19	2,658.37	1,301.42	434.05
6	Net Ekspor Barang dan Jasa	-16,653.45	-22,413.80	-20,896.47	-20,519.31	-19,677.72
	PDRB	**100,392.98**	**114,412.42**	**128,045.37**	**142,448.70**	**160,207.66**

* Angka sementara
** Angka sangat sementara

https://sulsel.bps.go.id

Lampiran 8
Produk Domestik Regional Bruto Kota Makassar Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran Tahun 2014-2018 (miliar rupiah)

	Komponen Pengeluaran	2014	2015	2016	2017*	2018**
1	Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga	44,554.42	46,624.27	49,258.28	52,493.94	55,561.02
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	1,181.75	1,189.91	1,227.78	1,312.86	1,530.48
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	8,073.90	8,610.15	8,339.30	8,466.84	9,063.08
4	Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	41,062.14	44,549.47	48,365.82	52,378.08	56,196.57
5	Perubahan Inventori	-1,035.65	2,866.38	1,898.03	979.21	231.41
6	Net Ekspor Barang dan Jasa	-11,243.73	-15,012.04	-13,131.58	-11,804.78	-10,014.16
	PDRB	**82,592.82**	**88,828.15**	**95,957.64**	**103,826.16**	**112,568.41**

* Angka sementara
** Angka sangat sementara

Lampiran 9

Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Gowa Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan UsahaTahun 2014-2018 (miliar rupiah)

	Lapangan Usaha	2014	2015	2016	2017*	2018**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,889.32	4,346.94	4,796.25	5,173.38	5,550.01
B	Pertambangan dan Penggalian	412.15	535.55	660.11	752.07	871.13
C	Industri Pengolahan	802.02	910.81	1,025.81	1,154.82	1,240.12
D	Pengadaan Listrik, Gas	16.59	15.52	17.95	22.56	24.98
E	Pengadaan Air	16.09	16.55	17.75	19.49	21.80
F	Konstruksi	1,216.43	1,407.02	1,611.44	1,834.92	2,148.13
G	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1,351.46	1,538.59	1,806.23	2,116.44	2,425.50
H	Transportasi dan Pergudangan	188.26	239.13	258.24	282.19	309.87
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	296.48	328.82	365.78	417.35	467.97
J	Informasi dan Komunikasi	1,013.42	1,065.20	1,203.07	1,351.28	1,524.25
K	Jasa Keuangan	304.72	348.78	412.60	440.64	476.99
L	Real Estate	916.09	1,160.87	1,320.04	1,446.37	1,580.47
M,N	Jasa Perusahaan	13.93	15.77	17.54	19.58	22.26
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	714.68	810.14	856.20	918.47	995.96
P	Jasa Pendidikan	515.53	572.58	608.39	678.72	763.38
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	209.72	247.25	279.73	314.56	352.81
R,S,T,U	Jasa lainnya	167.54	192.58	214.00	249.81	288.28
	PDRB	**12,044.43**	**13,752.09**	**15,471.11**	**17,192.66**	**19,063.89**

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

https://sulsel.bps.go.id

Lampiran 10

Produk Domestik Regional Kabupaten Gowa Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2014-2018 (miliar rupiah)

	Lapangan Usaha	2014	2015	2016	2017*	2018**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,116.77	3,232.80	3,401.02	3,555.19	3,708.33
B	Pertambangan dan Penggalian	262.61	295.06	335.04	379.94	427.99
C	Industri Pengolahan	622.48	663.81	717.79	779.61	811.12
D	Pengadaan Listrik, Gas	19.11	18.91	21.59	23.07	24.32
E	Pengadaan Air	14.04	14.08	14.69	15.68	17.27
F	Konstruksi	1,018.64	1,093.06	1,182.24	1,281.85	1,390.95
G	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1,126.02	1,197.77	1,324.67	1,443.82	1,585.64
H	Transportasi dan Pergudangan	141.46	151.31	156.26	166.75	181.62
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	232.75	247.75	267.27	294.35	329.24
J	Informasi dan Komunikasi	964.47	1,064.30	1,173.64	1,289.48	1,423.44
K	Jasa Keuangan	222.79	240.24	274.58	279.05	289.66
L	Real Estate	671.81	776.60	846.88	909.80	963.12
M,N	Jasa Perusahaan	11.57	12.18	13.08	14.15	15.46
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	550.38	570.42	583.12	610.19	632.19
P	Jasa Pendidikan	439.27	468.94	497.64	540.49	594.12
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	174.64	191.46	204.70	219.05	237.65
R,S,T,U	Jasa lainnya	131.38	141.52	151.83	168.91	190.54
	PDRB	**9,720.17**	**10,380.22**	**11,166.02**	**11,971.36**	**12,822.68**

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

https://sulsel.bps.go.id

Lampiran 11
Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Gowa Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Tahun 2014-2018 (miliar rupiah)

	Komponen Pengeluaran	2014	2015	2016	2017*	2018**
1	Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga	7,781.74	8,761.46	9,640.90	10,629.93	11,627.50
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	179.87	198.27	214.63	235.82	283.54
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1,471.82	1,671.40	1,810.79	1,939.72	2,206.53
4	Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	3,787.55	4,404.98	4,960.80	5,501.78	5,988.15
5	Perubahan Inventori	-154.78	-138.99	-122.48	-200.57	-105.04
6	Net Ekspor Barang dan Jasa	-1,021.77	-1,145.03	-1,033.55	-914.02	-936.78
	PDRB	**12,044.43**	**13,752.09**	**15,471.11**	**17,192.66**	**19,063.89**

* Angka sementara
** Angka sangat sementara

https://sulsel.bps.go.id

Lampiran 12
Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Gowa Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran Tahun 2014-2018 (miliar rupiah)

	Komponen Pengeluaran	2014	2015	2016	2017*	2018**
1	Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga	6,156.46	6,554.51	6,917.03	7,350.29	7,695.64
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	137.14	138.55	142.90	152.22	176.07
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1,103.81	1,182.28	1,215.59	1,267.49	1,346.23
4	Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	3,108.24	3,360.55	3,598.81	3,884.84	4,085.72
5	Perubahan Inventori	-129.77	-113.55	-90.79	-146.24	-58.82
6	Net Ekspor Barang dan Jasa	-655.71	-742.12	-617.51	-537.24	-422.16
	PDRB	**9,720.17**	**10,380.22**	**11,166.02**	**11,971.36**	**12,822.68**

* Angka sementara
** Angka sangat sementara

Lampiran 13

Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Maros Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan UsahaTahun 2014-2018 (miliar rupiah)

	Lapangan Usaha	2014	2015	2016	2017*	2018**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,116.11	2,473.85	2,707.13	3,056.37	3,242.81
B	Pertambangan dan Penggalian	906.06	986.03	1,081.68	1,208.40	1,350.07
C	Industri Pengolahan	2,762.35	3,075.55	3,245.90	3,570.31	3,642.51
D	Pengadaan Listrik, Gas	8.54	7.67	8.68	10.61	11.66
E	Pengadaan Air	12.79	13.31	14.06	17.58	19.26
F	Konstruksi	807.08	968.50	1,131.15	1,316.15	1,549.80
G	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	385.94	434.67	452.53	504.05	572.32
H	Transportasi dan Pergudangan	5,064.81	6,056.56	7,477.53	7,866.72	8,843.20
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	45.17	49.66	54.45	61.53	69.80
J	Informasi dan Komunikasi	148.75	163.11	185.13	211.05	229.10
K	Jasa Keuangan	193.41	208.13	232.17	244.48	265.44
L	Real Estate	177.61	190.93	212.70	233.24	257.76
M,N	Jasa Perusahaan	3.85	4.24	4.55	5.11	5.84
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	482.29	567.39	636.41	683.00	753.81
P	Jasa Pendidikan	208.80	229.72	244.66	263.00	287.09
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	89.43	101.06	110.41	119.02	129.28
R,S,T,U	Jasa lainnya	49.08	55.46	62.40	69.39	80.46
	PDRB	**13,462.07**	**15,585.84**	**17,861.53**	**19,440.01**	**21,310.22**

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

https://sulsel.bps.go.id

Lampiran 14

Produk Domestik Regional Kabupaten Maros Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2014-2018 (miliar rupiah)

	Lapangan Usaha	2014	2015	2016	2017*	2018**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,750.00	1,888.85	2,051.83	2,203.48	2,312.49
B	Pertambangan dan Penggalian	736.33	828.87	955.85	1,142.05	1,253.53
C	Industri Pengolahan	2,337.24	2,572.16	2,653.47	2,733.88	2,747.09
D	Pengadaan Listrik, Gas	9.66	8.97	10.04	10.65	11.23
E	Pengadaan Air	10.81	10.87	10.98	12.17	13.08
F	Konstruksi	573.02	627.45	677.32	737.51	807.44
G	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	354.45	371.95	395.40	415.44	451.11
H	Transportasi dan Pergudangan	3,161.03	3,407.38	3,917.73	4,175.99	4,541.58
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	34.75	37.14	39.63	41.56	46.55
J	Informasi dan Komunikasi	143.70	153.27	160.21	168.70	179.84
K	Jasa Keuangan	147.01	153.64	169.04	169.51	176.66
L	Real Estate	150.43	158.70	167.67	178.65	190.66
M,N	Jasa Perusahaan	2.62	2.71	2.80	3.06	3.37
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	373.17	399.09	432.88	453.02	478.68
P	Jasa Pendidikan	174.91	180.15	187.36	193.92	207.04
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	69.99	76.29	80.80	84.11	88.46
R,S,T,U	Jasa lainnya	37.71	39.22	40.99	44.60	49.94
	PDRB	**10,066.82**	**10,916.73**	**11,954.00**	**12,768.32**	**13,558.75**

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

https://sulsel.bps.go.id

Lampiran 15
Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Maros Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Tahun 2014-2018 (miliar rupiah)

	Komponen Pengeluaran	2014	2015	2016	2017*	2018**
1	Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga	6,579.10	7,461.13	8,274.21	9,127.52	10,110.91
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	138.32	161.35	179.26	197.02	229.01
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	983.91	1,102.40	1,238.30	1,317.81	1,451.17
4	Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	2,819.65	3,218.84	3,711.28	4,282.02	4,558.04
5	Perubahan Inventori	-138.48	343.88	303.45	186.83	58.77
6	Net Ekspor Barang dan Jasa	3,079.58	3,298.23	4,155.03	4,328.82	4,902.32
	PDRB	**13,462.07**	**15,585.84**	**17,861.53**	**19,440.01**	**21,310.22**

* Angka sementara
** Angka sangat sementara

https://sulsel.bps.go.id

Lampiran 16
Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Maros Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran Tahun 2014-2018 (miliar rupiah)

	Komponen Pengeluaran	2014	2015	2016	2017*	2018**
1	Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga	4,983.90	5,301.62	5,651.45	5,980.66	6,352.31
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	111.99	119.16	127.41	133.59	148.58
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	778.81	822.88	867.75	896.08	952.73
4	Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	2,159.25	2,311.47	2,496.26	2,740.00	2,872.51
5	Perubahan Inventori	-96.32	226.82	191.27	118.44	28.53
6	Net Ekspor Barang dan Jasa	-12,805.51	-13,952.57	-15,158.82	-16,159.70	-17,132.04
	PDRB	**10,066.82**	**10,916.73**	**11,954.00**	**12,768.32**	**13,558.75**

* Angka sementara
** Angka sangat sementara

Lampiran 17

Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Takalar Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan UsahaTahun 2014-2018 (miliar rupiah)

	Lapangan Usaha	2014	2015	2016	2017*	2018**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,881.61	3,402.15	3,916.65	4,326.52	4,684.06
B	Pertambangan dan Penggalian	104.46	126.48	140.25	154.29	166.02
C	Industri Pengolahan	346.39	383.48	420.70	453.86	467.91
D	Pengadaan Listrik, Gas	6.59	6.12	6.94	9.30	10.19
E	Pengadaan Air	3.04	3.16	3.28	3.62	3.93
F	Konstruksi	422.66	483.81	555.21	623.88	686.89
G	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	697.97	790.28	881.00	999.49	1,135.58
H	Transportasi dan Pergudangan	164.27	193.30	210.01	221.45	246.15
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	17.98	19.63	22.08	26.57	30.24
J	Informasi dan Komunikasi	229.51	245.23	276.23	312.17	337.51
K	Jasa Keuangan	97.46	110.34	130.23	141.64	153.32
L	Real Estate	328.01	375.62	424.06	473.81	504.09
M,N	Jasa Perusahaan	0.38	0.42	0.45	0.48	0.54
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	401.58	483.94	544.31	572.81	635.96
P	Jasa Pendidikan	84.30	92.76	102.06	112.86	124.36
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	81.28	89.82	99.27	106.60	113.65
R,S,T,U	Jasa lainnya	13.87	15.97	17.60	19.67	22.44
	PDRB	**5,881.37**	**6,822.49**	**7,750.36**	**8,559.00**	**9,322.84**

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

https://sulsel.bps.go.id

Lampiran 18

Produk Domestik Regional Kabupaten Takalar Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2014-2018 (miliar rupiah)

	Lapangan Usaha	2014	2015	2016	2017*	2018**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,130.33	2,336.14	2,589.74	2,774.42	2,956.03
B	Pertambangan dan Penggalian	71.53	77.15	84.19	91.44	97.30
C	Industri Pengolahan	279.91	295.39	312.94	328.42	332.54
D	Pengadaan Listrik, Gas	8.21	7.98	8.82	9.38	10.05
E	Pengadaan Air	2.74	2.75	2.82	3.01	3.24
F	Konstruksi	322.28	342.97	373.53	408.52	434.25
G	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	618.79	662.53	725.74	790.54	873.33
H	Transportasi dan Pergudangan	139.16	148.08	159.25	172.96	189.73
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	15.38	16.10	17.43	19.05	21.41
J	Informasi dan Komunikasi	178.38	194.83	214.53	236.23	252.77
K	Jasa Keuangan	59.28	63.86	71.92	76.33	80.16
L	Real Estate	275.95	297.37	321.93	349.72	365.04
M,N	Jasa Perusahaan	0.33	0.33	0.34	0.37	0.41
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	307.88	340.48	370.48	382.85	402.36
P	Jasa Pendidikan	68.32	71.76	74.82	79.82	86.78
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	58.52	61.56	63.86	66.79	68.94
R,S,T,U	Jasa lainnya	11.63	12.26	12.99	14.09	15.84
	PDRB	**4,548.62**	**4,931.54**	**5,405.32**	**5,803.94**	**6,190.18**

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

https://sulsel.bps.go.id

Lampiran 19
Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Takalar Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Tahun 2014-2018 (miliar rupiah)

	Komponen Pengeluaran	2014	2015	2016	2017*	2018**
1	Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga	3,725.63	4,219.98	4,697.39	5,150.53	5,653.82
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	96.08	107.32	120.41	135.86	157.96
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	829.24	954.20	985.66	1,033.82	1,131.29
4	Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	1,252.82	1,461.96	1,638.94	1,813.68	2,019.03
5	Perubahan Inventori	44.03	48.74	47.33	12.17	-33.95
6	Net Ekspor Barang dan Jasa	-66.42	30.30	260.64	412.94	394.70
	PDRB	**5,881.37**	**6,822.49**	**7,750.36**	**8,559.00**	**9,322.84**

* Angka sementara
** Angka sangat sementara

https://sulsel.bps.go.id

Lampiran 20
Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Takalar Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran Tahun 2014-2018 (miliar rupiah)

	Komponen Pengeluaran	2014	2015	2016	2017*	2018**
1	Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga	2,901.86	3,107.13	3,348.91	3,524.44	3,735.09
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	71.16	73.31	77.92	85.32	94.93
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	580.94	625.75	618.83	628.90	655.86
4	Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	1,006.05	1,083.28	1,173.17	1,270.63	1,348.46
5	Perubahan Inventori	36.03	21.82	17.81	10.85	-17.41
6	Net Ekspor Barang dan Jasa	-47.42	20.26	168.68	283.80	373.26
	PDRB	**4,548.62**	**4,931.54**	**5,405.32**	**5,803.94**	**6,190.18**

* Angka sementara
** Angka sangat sementara

DATA
MENCERDASKAN BANGSA

http://sulsel.bps.go.id

BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI SULAWESI SELATAN
Jl. Haji Bau No. 6 Makassar 90125
Telp: (0411) 854838, Fax: (0411) 851225
Homepage: https://sulsel.bps.go.id *Email*: bps7300@bps.go.id

ISBN 978-623-7581-32-1